

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SELOTONG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Oleh

ABDUL KURNIAWAN
NIM. 0501162163

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SELOTONG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Islam**

Oleh

ABDUL KURNIAWAN

NIM. 0501162163



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Balimbingan/5 April 1997
NIM : 0501162163
Fakultas : Ekonomi Islam
Alamat : Jalan Pendidikan Gang Saudara No.508 Dusun 2
Bandar Setia Pasar 12

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SELOTONG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 06 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan



Abdul Kurniawan
NIM. 0501162163

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SELOTONG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

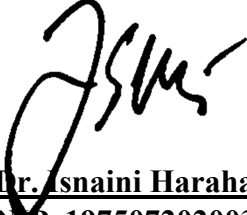
Oleh

Abdul Kurniawan
NIM. 0501162163

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 06 Oktober 2020

Pembimbing I



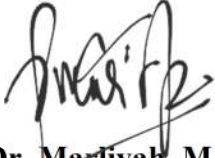
Dr. Isnaini Harahap, MA
NIP. 197507202003122002

Pembimbing II



Muhammad Svahbudi, M.EI
NIB. 2013048403

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, MA
NIP.197601262003122003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SELOTONG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, Abdul Kurniawan, NIM. 0501162163 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 November 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 21 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Ekonomi
Islam UIN-SU

Ketua



Dr. Marliah, MA
NIP.197601262003122003


Sekretaris



Imsar, M.Si
NIP.198703032005031004

Anggota

Pembimbing I



Dr. Isnaini Harahap, MA
NIP. 197507202003122002

Pembimbing II



Muhammad Syahbudi, M.EI
NIB. 2013048403

Penguji I



Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Penguji II



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Abdul Kurniawan, NIM. 0501162163. “**Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**”. Dibawah bimbingan pembimbing I **Dr. Isnaini Harahap, M.A** dan pembimbing II **M. Syabudi, M.EI**

Desa Selotong adalah salah satu desa yang terletak di Kec. Secanggang Kab. Langkat. Dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.616 jiwa yang terbagi dalam 1.546 KK dan mata pencaharian utama masyarakatnya yaitu nelayan mencapai 50%, petani 40%, lain-lain 10%. Desa Selotong salah satu desa yang masyarakatnya banyak menerima bantuan PKH dan BPNT. Bantuan ini adalah untuk masyarakat miskin. Dengan angka penerimaan bantuan mulai tahun 2016 berjumlah 353 KK sampai tahun 2020 sudah berjumlah 372 KK. Ini menandakan permasalahan kemiskinan masih tinggi. Dengan meningkatnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, menandakan bahwa ada permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di desa tersebut. Bahwasanya orang yang menerima PKH dan BPNT belum merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Responden penelitian ini adalah pihak pemerintahan Desa Selotong dan masyarakat penerima bantuan PKH dan BPNT berjumlah 12 (sepuluh) orang. Wawancara dilakukan bersifat santai dan tidak rumit, pertanyaan yang diajukan juga tidak bersifat mengintrogasi melainkan hanya untuk memperoleh data yang diinginkan guna menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong berjalan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program bantuan PKH dan BPNT masih ditemukan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan untuk masyarakat miskin. Karena hasil penelitian yang didapatkan antara realisasi penerima PKH dan BPNT dengan target penerima PKH dan BPNT adalah masih banyaknya masyarakat miskin atau target penerima PKH dan BPNT daripada masyarakat miskin yang sudah menerima atau realisasi penerima PKH dan BPNT.

Kata kunci: Kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, efektivitas, PKH dan BPNT, perspektif ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya dapat merampungkan penelitian ini. Di samping itu, shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia sebagai ajaran *rahmata lil a'lamin*.

Dalam upaya penulisan untuk merampungkan perkuliahan serta berusaha untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maka penulis berkewajiban mengadakan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun judul penelitian tersebut adalah: **“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

Berkat usaha yang maksimal dan dibarengi doa serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu dalam pengantar skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan Hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Anar, dan Ibunda tercinta Sudariani, juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dorongan semangat, bantuan baik berupa moril maupun materil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas diperkuliahan sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan namun dengan usaha, semangat dan do'a yang maksimal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, dalam penyelesaian ini juga banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Penasihat Akademik
5. Dr. Isnaini Harahap MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Muhammad Syahbudi, M.EI selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai lingkungan Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
8. Keluarga saya yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan yaitu, kakak Henny Afriyani Am.Keb, dan Winda Lestari. Abang Anton Libardo SE.Akt, dan Mariyadi.
9. Orang-orang yang penulis sayangi, adik Gita Qolbiana Ramadhani Sinaga, Ahmad Reza Maulana dan Winda Maulidina Damanik S.E. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan semasa perkuliahan EKI-A 2016 yang selalu mendukung, mengingatkan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis.

Demikianlah kata pengantar ini dari penulis dan sebagai satu intropeksi diri, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Oleh Karena itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat lah penulis harapkan. Semoga skripsi ini ada manfaatnya untuk semua terutama untuk penulis sendiri sebagai karya yang

pertama, dan sembari mengharapkan semoga Allah SWT meridhoi kerja dan usaha-usaha yang telah dikerjakan selama ini. Aamiin.

Medan, 06 Oktober 2020

Penulis,

A handwritten signature in brown ink, appearing to be 'Abdul Kurniawan', written over a faint, illegible stamp or background.

Abdul Kurniawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Batasan Masalah	9
E. Kerangka Teori	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Metodologi Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	15
3. Subjek Penelitian	16
4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Kemiskinan	24
1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum	24
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	25
3. Program Pengentasan Kemiskinan	27
4. Pengertian Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	28
5. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	30
6. Indikator Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	37
B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	39
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum.....	39
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	39
3. Pengertian Kesejahteraan (<i>Falah</i>) dalam Perspektif Ekonomi Islam	40
4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	43
C. Efektivitas Program Kerja Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	46
1. Pengertian Efektivitas	46
2. Pengukuran Efektivitas	47
3. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan(PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	48
D. Program Keluarga Harapan (PKH)	50
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	50
2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	50
3. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	51
4. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	52
5. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	54

E. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	54
1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	54
2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	55
3. Prinsip Utama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	55
4. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	56
5. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	56

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Selotong.....	57
1. Letak dan Luas Desa	57
2. Kependudukan	58
B. Tingkat Kemiskinan Desa Selotong	60
1. Perekonomian Masyarakat	60
2. Kesejahteraan Keluarga	61

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong	63
B. PKH dan BPNT dalam Perspektif Ekonomi Islam	64
C. Efektivitas PKH dan BPNT di Desa Selotong	68
D. Dampak PKH dan BPNT terhadap Masyarakat Desa Selotong..	70
E. Analisa Penulis.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Persentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Daerah Tempat Tinggal	1
Tabel 1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat 2010-2019	2
Tabel 1.3	Pelaksanaan PKH di Provinsi Sumatera Utara	3
Tabel 1.4	Daftar Penerima Program Keluarga Harapan(PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Selotong Tahun 2015-2018	6
Tabel 1.5	Instrumen Wawancara	18
Tabel 2.1	Aspek Mikro dan Aspek Mako Dalam Falah	45
Tabel 2.2	Ukuran Efektivitas	48
Tabel 2.3	Nilai Manfaat Tahunan PKH 2019 Menurut Komponen	52
Tabel 3.1	Batas-Batas Wilayah Desa Selotong	57
Tabel 3.2	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 3.3	Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian	59
Tabel 3.4	Usia Angkatan Kerja	60
Tabel 3.5	Kesejahteraan Keluarga	62
Tabel 4.1	Dampak PKH dan BPNT Terhadap Masyarakat Desa Selotong Dengan Melihat Rata-Rata Kesejahteraan Keluarga di Tahun 2020	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	11

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi	93
Lampiran 2 Surat Izin Riset	94
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	95
Lampiran 4 Gambar Dokumentasi	123

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan di Indonesia bukan merupakan masalah baru. Sesudah Indonesia merdeka, masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia, baik dari masa orde lama, orde baru bahkan sampai masa reformasi pada detik ini. Meskipun usaha demi usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, namun masalah tersebut tetap hidup bersama bangsa ini.¹

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Daerah Tempat Tinggal

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018
1	Kota	8.29	7.79	7.72	7.02
2	Desa	14.21	14.11	13.93	13.20

*Sumber: BPS- Survey Sosial Ekonomi Nasional 2015-2018
(update 4 Oktober 2019)²*

Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dari persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut daerah tempat tinggal mulai tahun 2015-2018 ini angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan terlihat seperti pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 penduduk miskin mencapai 8.29% (kota) dan 14.21 (desa), pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 7.79% (kota) dan 14.11% (desa), pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 7.72% (kota) dan 13.93% (desa) dan kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan penduduk miskin lagi menjadi 7.02% (kota) dan 13.20% (desa).

¹Syaiful Ilmi. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah: Vol. 13 No. 1, April 2017)

²BPS - *Survey Sosial Ekonomi Nasional 2015-2018*, <https://www.bps.go.id/>, (update 4 Oktober 2019)

Dari data BPS di atas terlihat bahwa mulai 2015-2018 penduduk miskin mengalami penurunan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi relatif terkendali selama September ke Maret, adanya peningkatan pendapatan penduduk sehingga menjadikan membaiknya harga komoditas pangan yang stabil mendorong konsumsi masyarakat bertambah sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan. Kemudian jika dilihat dari data BPS di atas untuk tingkat penduduk miskin di kota lebih sedikit dari pada di desa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti meningkatnya industrialisasi yang banyak menciptakan lapangan kerja di kota-kota besar membuat angka kemiskinan perkotaan lebih rendah dari pedesaan.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat
2010-2019

Tahun	Jumlah	Persentase
2010	104 800	10,85
2011	100 800	10,32
2012	99 273	10,02
2013	104 310	10,44
2014	100 630	9,99
2015	114 190	11,30
2016	115 790	11,36
2017	114 410	11,15
2018	105 460	10,20
2019	103 080	9,91

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat Dalam Angka 2020³

Dari data di atas menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Langkat dari jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2010-2019 dengan didapatkan data dalam kurun 10 tahun terakhir kita melihat akan laju perubahan jumlah penduduk miskin dan persentase pada tiap tahunnya yang selalu mengalami perubahan. Dan sampai pada tahun 2019 untuk Kabupaten Langkat jumlah penduduk miskinnya 103.080 dengan persentase 9,91%.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan

³BPS Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam 2020*, h. 178

tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan Pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.⁴ Dari pasal-pasal ini menjelaskan bahwa akan hak-hak setiap warga negara dan menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.⁵ Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin.⁶

Tabel 1.3
Pelaksanaan PKH di Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Pelaksanaan PKH di Kab/Kota
1	2008	3 Kabupaten/Kota
2	2009-2010	Pengembangan Kecamatan pada 3 Kabupaten wilayah tahun 2008
3	2011	6 Kabupaten/Kota
4	2012	8 Kabupaten/Kota
5	2013	15 Kabupaten/Kota
6	2014	21 Kabupaten/Kota
7	2015	33 Kabupaten/Kota

⁴UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

⁵Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TNP2K, 2012), h. 19

⁶Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 11

8	2016	Pengembangan wilayah sudah di 33 Kabupaten/Kota untuk seluruh Kecamatan
9	2017	Pengembangan wilayah sudah di 33 Kabupaten/Kota untuk seluruh Kecamatan

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara⁷

Dari data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara diatas untuk wilayah di Sumatera Utara akan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan sejak tahun 2008 dengan 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapatkan bantuan ini. Kemudian untuk tahun berikutnya mengalami peningkatan akan pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota. Dan hingga sampai pada tahun 2017 sudah 33 wilayah Kabupaten/Kota untuk seluruh Kecamatan yang ada di Sumatera Utara.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016 memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara non tunai kepada para penerima bantuan. Sesuai hasil rapat terbatas tertanggal 16 Maret 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi disepakati bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat raskin (yang kemudian disebut Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) dilakukan melalui mekanisme non tunai (menggunakan teknologi *e-voucher*) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah terjangkau.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga

⁷Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017*, h. 5

Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan (*e-warong*) yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai *pilot project* dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional.⁸

Kabupaten Langkat mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2014, sedangkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Langkat tahun 2015.⁹ Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu transformasi dari RASTRA mulai dilaksanakan di tahun 2017 di Kabupaten Langkat. Melihat masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Langkat ini yang didominasi kemiskinan di pedesaan, termasuk salah satu wilayah desanya yaitu di Desa Selotong. Dengan begitu untuk implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu dilakukan di Kabupaten ini dengan maksud dan tujuan supaya mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Langkat, termasuk di Desa Selotong untuk jangka panjangnya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Desa Selotong salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.616 jiwa yang terbagi dalam 1.546 KK dan mata pencaharian utama masyarakatnya yaitu nelayan mencapai 50%, petani 40%, lain-lain 10%.¹⁰

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tujuan

⁸Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi. *Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, Juni 2018), h. 2

⁹Lastprinces Br. Sitepu, *Implementasi dan Respon Masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Hinai Kab. Langkat*, (Medan: Skripsi Universitas Negeri Medan, 2017), h. 3

¹⁰Kantor Desa Selotong, *Daftar Isian Profil Desa Tahun 2019*

pelaksanaannya meliputi aspek 6 T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Administrasi diharapkan dapat bermanfaat sehingga kebijakan dari program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. PKH dan BPNT yang tujuannya supaya bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa tersebut, ini masih belum tercapai dalam pengentasan dan meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 1.4

Daftar Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Selotong Tahun 2017-2020

BPNT dan PKH	
Tahun	Jumlah (KK)
2017	353
2018	339
2019	372
2020	372

*Sumber: Data Diolah dari Kantor Desa Selotong
Kec. Secanggang Kab.Langkat¹¹*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data penerima PKH dan BPNT di Desa Selotong dari tahun 2017-2020 mengalami perubahan. Untuk tahun 2017 jumlah penerima PKH dan BPNT sebanyak 353 KK. Untuk tahun 2018 mengalami penurunan jumlah penerima PKH dan BPNT dengan jumlah 339 KK. Dan kemudian untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan jumlah penerima PKH dan BPNT dengan jumlah 372 KK. Dengan meningkatnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, menandakan bahwa ada permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di desa tersebut. Bahwasanya orang yang menerima PKH dan BPNT belum merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Karena sifat dari PKH dan BPNT adalah mensejahterakan masyarakat miskin yaitu dalam bentuk uang

¹¹Kantor Desa Selotong, Jumlah Penerima PKH dan BPNT Tahun 2017-2020

tunai (*cash transfer*) untuk program PKH dan program BPNT dalam bentuk pencairan bahan pokok melalui media buku tabungan.

Sehubungan aspek tujuan adanya program PKH dan BPNT yaitu meliputi 6 T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Administrasi diharapkan dapat bermanfaat sehingga kebijakan dari program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik, tapi faktanya yang dirasakan belum optimal. Seperti kurang Tepat Sasaran, dimana yang seharusnya mendapatkan program-program tersebut tidak menerimanya dan kurang tepatnya administrasi, dimana kesalahan pembagian administrasi penerima program PKH dan BPNT.

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong ?
2. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Perspektif Ekonomi Islam?
3. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menanggulangi kemiskinan di Desa Selotong?
4. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap masyarakat di Desa Selotong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong.
- b. Untuk mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- c. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menanggulangi kemiskinan di Desa Selotong.
- d. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap masyarakat di Desa Selotong.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu :

- a. Bagi Peneliti
Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat.
- b. Akademisi
Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- c. Masyarakat
Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

d. Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

D. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan kesulitan untuk memahami permasalahan tentang efektivitas PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka penulis membuat batasan masalah sebagai bahan acuan. Dimana dalam perspektif ekonomi Islam implementasinya yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan

Dari penerapan adil dalam menyangkut penerimaan program bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong yang dirasakan adalah masih kurang tepat sasaran untuk menentukan peserta penerima bantuan, karena yang mendapatkan bantuan tidak sepenuhnya masyarakat miskin melainkan orang yang mampu juga mendapatkan. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program bantuan PKH dan BPNT yang ada di Desa Selotong. Oleh karena itu dalam perspektif Ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan dengan melalui adanya program bantuan sosial ini masih kurang efektif karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan.

2. Tanggung Jawab

Untuk implementasi bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini belum ada tanggung jawab secara penuh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan PKH dan BPNT ini masyarakat penerima bantuan ditentukan berdasarkan data-data lama, sehingga terdapat masyarakat yang sudah beralih status sosialnya

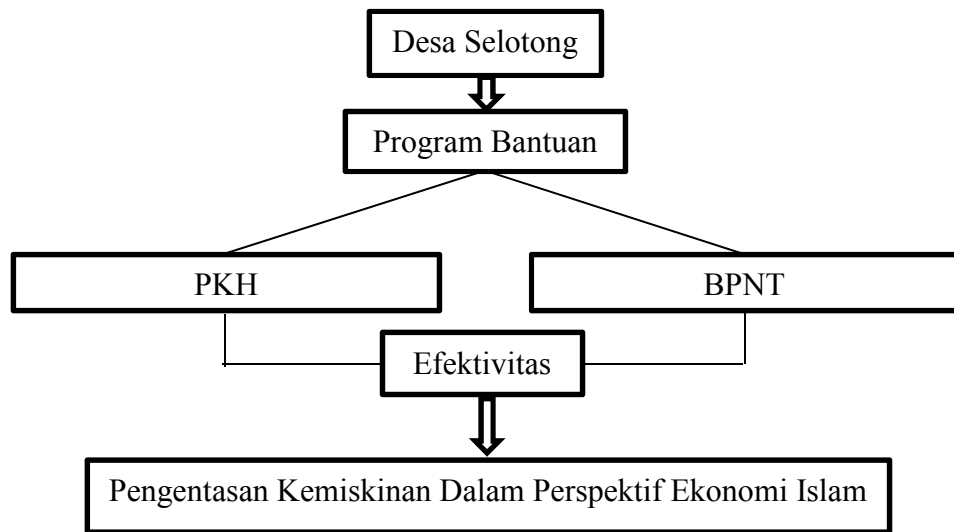
masih saja mendapatkan bantuan PKH dan BPNT karena data yang ada di pemerintah masih tergolong data lama masyarakat miskin sehingga masyarakat yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan ini tidak termasuk peserta penerima bantuan dengan alasan belum terdata dan akan mendapat bantuan di waktu berikutnya. Dengan demikian proses bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini belum terealisasi secara baik dan juga untuk tanggung jawab belum secara penuh dilakukan oleh petugas ataupun pengelola program bantuan PKH dan BPNT ini.

3. Jaminan Sosial

Seperti halnya PKH dan BPNT yang ada di Desa Selotong ini yang memberikan jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin penerima bantuan, sehingga dalam keluarga masyarakat penerima bantuan ini adanya bantuan sosial untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kemudahan dalam mengakses bantuan untuk pendidikan dan kesehatan tersebut. Dan untuk implementasi program bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islamnya untuk jaminan sosial dengan perlindungan sosialnya ini kepada masyarakat dapat dirasakan dengan baik dengan adanya bantuan untuk pendidikan dan kesehatan yang didapatkan.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini memiliki kerangka teoritis yang merupakan kerangka penalaran dari adanya konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan peneliti. Supaya dapat menyusun secara sistematis dan agar dapat berguna dalam memecahkan atau menyoroiti masalah dalam penelitian ini. Berikut ini adalah merupakan bagan dalam kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pada penelitian dengan maksud dan tujuan adalah untuk melihat bagaimana efektivitas dari adanya program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Apakah dengan adanya bantuan dari program PKH dan BPNT untuk masyarakat Desa Selotong ini efektif bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Selotong atau sebaliknya, dengan adanya bantuan dari program PKH dan BPNT tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Selotong.

F. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini mencakup tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat juga perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi.

Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi¹², yang membahas tentang “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan” pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir dengan variabel penelitian kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan efektivitas dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program, penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum bisa dikatakan efektif penentuan sasaran belum tepat sasaran.

Hajar Hari Antoro¹³, yang membahas tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya” pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan variabel penelitian efektivitas, Program Keluarga Harapan, dan pendidikan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di Desa Sungai Kakap yaitu produktifitas dan keseluruhan prestasi, pelaksanaan Program keluarga Harapan di bidang pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktifitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di Desa Sungai Kakap tidak produktif.

¹²Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan*, (Jurnal Ilmu Sosial Mamangan: Vol. 3, No. 1, 2014)

¹³Hajar Hari Antoro, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Publika: Vo. 14, No. 4, 2015)

Slamet Riyadi¹⁴, yang membahas tentang “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (*studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*)” pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan (*studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*) dengan variabel penelitian evaluasi kebijakan publik, PKH, dan Keluarga Sangat Miskin dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan PKH yang mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH pada fasdik dan faskes, adanya mekanisme pendampingan yang intens oleh petugas, pertemuan kelompok KSM, menunjukkan hasil positif dibandingkan bantuan langsung tunai tanpa prasyarat.

Kartiawati¹⁵, yang membahas tentang “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam dengan variabel penelitian kemiskinan dari perspektif ekonomi islam, efektivitas, dan PKH dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan PKH di Kampung Bonglai yang dimulai sejak tahun 2014-2017 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah di Kampung Bonglai kurang terlaksana secara efektif.

¹⁴Slamet Riyadi, *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016)

¹⁵Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017)

Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi¹⁶, yang membahas tentang “Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan perspektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan variabel penelitian efektivitas, program, Rastra, BPNT, dan beras dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT, permasalahan utama dalam program Rastra harus segera diselesaikan, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, rapel beras, jumlah beras yang diterima, dan kualitas beras yang masih rendah. Sementara pada program BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan signal GPRS di semua wilayah, sasaran penerima dan kualitas beras juga perlu segera diatasi.

Tondhi Ramadhan¹⁷, yang membahas tentang “Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan variabel penelitian program BPNT, masyarakat, Kecamatan Tampan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas program BPNT di Kecamatan Tampan secara keseluruhan dalam kategori baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tampan secara keseluruhan.

Penelitian tentang efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi, Hajar Hari Antoro,

¹⁶Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, 2018)

¹⁷Tondhi Ramadhan, Syamsul Bahri, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol. 5 Edisi II, 2018)

Slamet Riyadi, Kartiawati, Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, Tondhi Ramadhan, dan Syamsul Bahri.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah variabel-variabel yaitu kemiskinan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, dan efektivitas PKH dan BPNT. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan kemudian metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara deskriptif, dan tempat penelitian yang dilakukan di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Disebut penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dimana peneliti melakukan pencarian data di lapangan (lokasi penelitian), karena penelitian ini dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata.

Hal ini bertujuan agar peneliti memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, partisipan dari warga penerima PKH dan BPNT yang ada di desa tersebut. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, agar memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan dan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Adapun pengambilan lokasi penelitian

ini dikarenakan peneliti pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 bulan di desa tersebut dan melihat untuk setiap rumah masih banyak terpasang penanda Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan bantuan sosialnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang diwawancarai. Disini yang menjadi subjek (informan) dalam penelitian ataupun yang diwawancarai yaitu dari pihak Kantor Desa Selotong dan juga para penerima bantuan dari PKH dan BPNT dengan jumlah 12 orang. Dan berikut daftar nama para informan ataupun responden:

- 1) Ibu Fatimah, sekretaris desa, dipilih menjadi responden karena sebagai sekretaris desa dianggap mengetahui tentang hal-hal yang berkenaan dengan PKH dan BPNT terhadap masyarakat Desa Selotong.
- 2) Ibu Fitriani, KASI pemerintahan, dipilih menjadi responden karena KASI pemerintahan desa dianggap mengetahui akan pendataan warga desanya yang menerima bantuan PKH dan BPNT.
- 3) Ibu Sulasmi, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 4) Ibu Nur Ningsih, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 5) Ibu Poninten, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 6) Ibu Doniyem, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 7) Ibu Nuraini, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 4 tahun.
- 8) Ibu Santi Handayani, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.

- 9) Ibu Darwati, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 10) Ibu Salmiah, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 11) Ibu Siti Masitah, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.
- 12) Ibu Ernawati, ibu rumah tangga. Dipilih menjadi subjek karena telah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu dengan cara:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.¹⁸

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak pemerintahan Desa Selotong dan juga para warga penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong

¹⁸Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FBI UIN-SU Press, 2016), h. 52

tersebut. Wawancara ini merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang efektivitas PKH dan BPNT dalam pengentasan kemiskinan di Desa Selotong.

Adapun instrumen wawancara disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Instrumen Wawancara

Unsur	Daftar Pertanyaan wawancara
What	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatrkan bantuan ini? 2. Apakah hasil yang telah dicapai program program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong? 3. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen? 4. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya? 5. Apa partisipasi yang dilakukan masyarakat yang menerima bantuan PKH dan BPNT untuk Desa Selotong ini? 6. Apakah dengan adanya bantuan ini merubah perilaku masyarakat? 7. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?
Why	Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan PKH dan BPNT di Desa Selotong?
Where	-
Who	-
When	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?
How	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT? 2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT? 3. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini? 4. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT? 5. Berapa jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong?

	<p>6. Bagaimana gambaran PKH dan BPNT di Desa Selotong?</p> <p>7. Bagaimana respon masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT ini? Adakah kecemburuan sosial?</p> <p>8. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa?</p>
--	---

b. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.¹⁹

Peneliti mengamati keadaan ataupun fenomena yang terjadi di Desa Selotong terkait dengan adanya bantuan PKH dan BPNT untuk warga di desa tersebut, seperti masih banyaknya di depan rumah menempel plang tertulis RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) penerima bantuan PKH. Maka observasi ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi.²⁰ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar. Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan bantuan PKH dan BPNT untuk

¹⁹*Ibid.*, h. 54

²⁰*Ibid.*, h. 56

Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Selotong yaitu dengan cara mengambil gambar dengan kamera dan alat rekaman sebagai alat untuk wawancara.

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dalam melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, yaitu dari pihak pemerintahan Desa Selotong, dan juga para penerima bantuan PKH dan BPNT dengan sebanyak 12 orang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Untuk data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari data BPS, Dinas Sosial, Kantor Desa, TNP2K dan BKKBN.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang menganalisis tentang efektivitas PKH dan BPNT dalam pengentasan kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil observasi dan wawancara ke dalam tema-tema, kategori-kategori. Proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Selotong. Dan berupaya

menarik realitas itu sebagai suatu ciri, karakter, sifat, tanda ataupun gambaran tentang kondisi, dan situasi yang ada di Desa Selotong.

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini ada tiga yaitu :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.²¹ Jadi untuk reduksi data ini, peneliti membuat uraian atau laporan lebih terperinci dari hasil penelitian yang di dapat di Desa Selotong untuk mengetahui efektif atau tidaknya bantuan dari pemerintah yaitu PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dengan merangkum dan menyusun lebih sistematis dari hasil penelitian ini.

b. Display data

Agar dapat melihat gambaran yang keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, networks dan charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display ini juga merupakan analisis.²² Jadi dari hasil penelitian yang di dapat di Desa Selotong tentang efektivitas dari bantuan PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau

²¹Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FBI UIN-SU Press, 2016), h. 80

²²*Ibid.*, h. 80

dari perspektif ekonomi Islam ini, peneliti membuat hasil data yang di dapat kedalam bentuk matrik, grafik, network ataupun dengan chart.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih *grounded*. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tema untuk mencapai *inter-subjective consensus* yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas (*confirmability*).²³ Jadi disini peneliti untuk membuat kesimpulan dengan menyimpulkan data-data temuan di lokasi penelitian ini dengan cara yang tidak terburu-buru tetapi secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan perolehan data yang didapat kemudian setelah itu baru dilakukan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, dibuat dalam beberapa bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah landasan teori. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, efektivitas PKH dan BPNT, Pengertian PKH, pengertian BPNT, dan juga dalam bab ini tidak terlepas dari perspektif ekonomi Islam.

Bab III, adalah gambaran umum lokasi penelitian. Mencakup gambaran umum Desa Selotong dan tingkat kemiskinan di Desa Selotong.

Bab IV, adalah temuan dan pembahasan penelitian. Mencakup perkembangan PKH dan BPNT, dalam perspektif ekonomi Islam, dan

²³*Ibid.*, h. 80

efektivitas PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong dan juga dampak PKH dan BPNT terhadap masyarakat di Desa Selotong.

Bab V, adalah penutup yaitu menyajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²⁴ Dengan kondisi seperti ini, ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²⁵

Kemiskinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Analisanya juga bisa beragam begitupun solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Meskipun banyak program pengentasan kemiskinan, namun sampai saat ini masalah kemiskinan belum sepenuhnya bisa diatasi. Memang kemiskinan memiliki permasalahan yang kompleks, dimana akar penyebabnya seperti benang kusut yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga sulit untuk memutus rintangnya.²⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang selalu berada dengan kondisi ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu seperti ketidakmampuan dalam: *Pertama*, melakukan kegiatan usaha produktif. *Kedua*, menjangkau

²⁴Yulid B.S. Tlonaen, Willy Tri Hardianto, Carmia Diahloka, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik: Vol. 3, No. 1, 2014), h. 29

²⁵Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08, No. 03, September, 2005), h. 112

²⁶Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 112

akses sumber daya sosial-ekonomi. *Ketiga*, menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminasi. *Keempat*, membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah mengenai kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan itu tidak hanya membahas akan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan kondisi, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-

program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat disebabkan adanya tuntutan tradisi yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta adat lainnya, termasuk juga dalam hal ini adalah sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke masa depan.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kemiskinan ini terjadi karena kelembagaan, tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang telah terstruktur dengan piramida sosial yang menempatkan adanya pembagian kelas dalam masyarakat yaitu kelas atas (*highb class*), kelas menengah (*midle class*), dan kelas bawah dan paling bawah (*lower and lower-lower class*).²⁷

Setelah mengenal empat bentuk kemiskinan diatas, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, yaitu:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya

²⁷ *Ibid.*, h. 117-119

kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan atau sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan dan seringkali dikaitkan dengan konsep pembangunan di negara-negara sedang berkembang.

3. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) yang saat ini ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupa bantuan tunai maupun non tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

²⁸TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/> (diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019)

4. Pengertian Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengkategorikan yang punya harta (uang), tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tidak punya harta (uang), sekaligus tidak punya penghasilan.²⁹

Salah satu ayat al-Qur'an yang membahas tentang miskin dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya : *Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.*³⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Balad ayat 16 ini menjelaskan bahwa miskin adalah: “Yakni sangat miskin sehingga menempel ditanah, lagi tak punya apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *dza matrabah* artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel di tanah.

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.³¹

Al-Qur'an, mengisyaratkan bahwa Allah adalah Sang Pemilik dan Penguasa Seluruh Alam, termasuk segala isinya. Maka dalam hal ini,

²⁹Sri Budi Cantika Yuli, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomika-Bisnis: Vol. 4 No. 2 Juli 2013), h. 103

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 594

³¹Sri Budi Cantika Yuli, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomika-Bisnis: Vol. 4 No. 2 Juli 2013), h. 103-104

Islam mengajarkan bahwa manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya sebatas menerima dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Maka sebagai konsekuensinya ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta sedekah dan infak. Allah menjadikan harta sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan mereka bersama. Pemberian zakat, sedekah dan infak yang diajarkan Islam mengarahkan pada nilai solidaritas dan persaudaraan terhadap sesama.³²

Umat Islam Indonesia yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan memahami bahwa kemiskinan yang mereka derita adalah takdir (ketetapan yang tidak bisa diubah) dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah telah menentukan hidupnya miskin, jadi segigih apapun mereka berusaha, hasilnya tetap miskin. Kerjapun akhirnya dipahami hanya untuk memenuhi dan menyambung hidup, dan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ironisnya ada pula yang tidak mau bekerja, karena dianggap sia-sia dan bagi mereka seberapa besar rizki itu telah ditentukan Allah dan manusia hanya menunggu saja.³³

Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*³⁴

³²Yuliyani, *Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), h. 152

³³Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), h. 126

³⁴*Ibid.*, h. 563

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ayat 15 ini menjelaskan bahwa: “Berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk mencari mata pencaharian dan perniagaan (mencari rezeki). Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Thaha ayat 14:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: *Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.*³⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Thaha ayat 14 ini menjelaskan bahwa: “ini merupakan kewajiban pertama bagi orang mukalaf, yaitu hendaknya ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan sholatlah untuk mengingat Allah”.

Mengenai penjelasan dari kedua surat di atas yang berdasarkan dari tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwasanya kebutuhan untuk manusia di muka bumi adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan juga pemenuhan kebutuhan akan spiritual pada tiap diri seorang manusia yakni seperti sholat, yang telah dijelaskan pada ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mendirikan shalat. Terkait dengan perkara shalat, ibadah dengan ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain, seperti dengan selalu memberikan manfaat untuk orang lain, dengan begitu akan menciptakan falah (keberuntungan) yang akan membuat tercapainya segala apa yang diharapkan dan berkah untuk dunia dan akhirat.

5. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengatur sedemikian rupa menyangkut masalah kemiskinan umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 313

penyebab kemiskinan, diantaranya adalah kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kebakhilan orang kaya yang menyebabkan orang miskin semakin terjatuh dari lingkaran kemiskinannya.³⁶

Mengenai akan faktor kemiskinan di atas, tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah harta yang dimiliki oleh setiap orang, dimana dari harta yang dimiliki digunakan memenuhi kebahagiaan dalam kehidupannya dan agar bisa terlepas dari yang namanya kemiskinan.

Akan tetapi, dalam Islam harta bukanlah suatu tujuan hidup. Bukan suatu sebab untuk mencapai kebahagiaan. Kalau seseorang menempatkan harta sebagai tujuan hidup dan menganggap segala-galanya, maka ia akan sering mendapatkan kesulitan daripada kedamaian hati. Tujuan hidup adalah melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban. Adapun harta benda yang kita miliki merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu. Kita beribadah perlu harta. Orang tak akan bisa membangun masjid, menyantuni yatim piatu, berzakat dan bersedekah dan berangkat haji tanpa didukung oleh sarana harta benda.³⁷

Kadang-kadang orang menjadi tergila-gila oleh harta benda. Ia membanting tulang dan memeras keringat, tak kenal siang atau malam, tak kenal kawan atau lawan asal tujuannya tercapai. Kalau harta sudah didapat, ia ingin lebih banyak lagi dan ingin terus bertambah. Kesibukannya memburu harta membuat dirinya lupa terhadap kewajiban. Ibadahnya menjadi malas. Bahkan hatinya menjadi kikir. Harta yang terkumpul sangat dicintainya sehingga enggan mengeluarkan sedekah atau berzakat. Orang-orang yang demikian ini justru menjadi budak hartanya sendiri. Sangatlah beruntung orang kaya yang mampu mengendalikan harta kekayaannya. Dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, gemar bersedekah, berzakat, menunaikan ibadah haji, infak, menyantuni yatim piatu dan sebagainya. Semakin banyak hartanya semakin sering pula ia

³⁶Yuliyani, *Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan*, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), h. 152

³⁷Isnaini Harahap, Marliyah dan Bambang Irawan, *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, November 2015), h. 154

bersyukur kepada Allah. Ibadahnya menjadi lebih tekun Orang-orang yang demikian ini sadar kalau harta yang didapatkan semata-mata karena kemurahan Allah sehingga dimanfaatkan sebagaimana mestinya.³⁸

Berkenaan akan hal ini tentunya dalam Islam dalam mengentaskan kemiskinan ini dengan penggunaan harta bukan hanya untuk di dunia melainkan harus diseimbangkan untuk di akhirat kelak. Seperti bisa mencontoh dari Abdurrahman bin Auf akan rahasia yang dilakukan untuk sukses dunia dan akhirat, tentunya disini dalam mengentaskan kemiskinan dalam Islam itu, yaitu seperti³⁹ :

a. Berbisnis untuk mencari keridhaan Allah semata

Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang jujur dan profesional. Ia senantiasa menghindari hal-hal yang haram bahkan subhat sekalipun. Ia tidak pernah melakukan praktek ribawi atau menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan. Sehingga keseluruhan hartanya adalah harta yang halal.

b. Selalu berpikiran positif

Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa beliau mampu untuk menghasilkan uang, bahkan dengan kata-katanya: mengangkat batupun ia bisa mengasilkan emas dan perak. Secara tidak langsung Abdurrahman bin Auf yakin bahwa ia bisa menghasilkan uang dari setiap usaha dan perniagaannya.

c. Hasil usaha serta kekayaannya tidak dinikmatinya sendiri

Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah.

d. Selalu berorientasi kepada Akhirat

³⁸*Ibid.*, h. 154-155

³⁹*Ibid.*, h. 131

Meskipun hidupnya berkelimpahan harta dan kekayaan, itu tidak membuatnya lupa akan akhirat. Bahkan kecintaannya kepada akhirat semakin kuat dan membara.

Setelah bercermin dari apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf tentunya dalam Islam adalah sebuah tindakan mengentaskan kemiskinan, tentunya juga agar seimbang akan sukses dunia dan akhirat. Kemudian dalam Islam ada yang bisa juga dilakukan yaitu mengenai strategi pengentasan kemiskinan. Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja, yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*).

Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*).

Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad karena perang. Yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran

melalui *good governance*. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama.

- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*).

Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*).

Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan dan kesehatan.

- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*).

Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf.⁴⁰

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam dibagi pada tiga hal pokok⁴¹, yaitu :

- a. Kewajiban Setiap Individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup di muka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di bumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

⁴⁰Sri Budi Cantika Yuli, *Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomika-Bisnis: Vol. 4 No. 2 Juli 2013), h. 108-109

⁴¹Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 38

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁴²

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini menjelaskan bahwa: “setelah mereka dilarang untuk bertransaksi sesudah seruan yang memerintahkan mereka berkumpul (shalat), kemudian diizinkan bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini dan juga berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa adanya kewajiban individu untuk bekerja atau mencari nafkah. Hal ini adalah merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, Bekerja atau mencari nafkah adalah hal utama dalam memperoleh kekayaan serta faktor yang dominan dalam memakmurkan dunia.

b. Kewajiban Kelompok Atau Masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 :

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 554

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ^ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ظ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan.⁴³

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa: “Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nafkah *tatawwu*’. As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini di-nasakh oleh zakat, tetapi pendapatnya masih perlu dipertimbangkan. Makna ayat ini adalah seruan untuk membelanjakan harta kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan”. Pada surat Al-Baqarah ayat 215 ini yang penjelasannya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa zakat yang diberikan adalah salah satu cara untuk saling menjamin dan mencukupi hidup baik antar kerabat dekat, anak yatim maupun sesama kaum muslim yang memerlukan pertolongan.

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam, pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin yang sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ^ط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ الْعِيبِ ^ج بِإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

⁴³Ibid., h. 33

Artinya: *Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*⁴⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa: “maksud keadilan pada ayat ini menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengatakan bahwa keadilan itu adalah perkara hak yang diakui oleh rasio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sakit lagi tidak benar”. Pada penjelasan surat Al-Hadid ayat 25 ini yang berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwasanya pemerintah itu merupakan pemimpin yang mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat yang ia pimpin, termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Dalam komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan hidup, terutama pada kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

6. Indikator Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ada tiga indikator pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu :

a. Rekonstruksi Teologi Kemiskinan

Rekonstruksi teologi yang dimaksud adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis ‘miskin’ itu sendiri, yaitu ‘diam atau tidak bergerak’. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak

⁴⁴*Ibid.*, h. 539

mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri.

b. Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Fenomena tersebut menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya.

Pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal atau individu dalam upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting.

Kedua, peran pemerintahan. Aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep *welfare state* (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitanya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. Membangun Etos Kerja Individu

Tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam etos kerja terkandung “spirit” atau semangat untuk

mengubah sesuatu jauh lebih baik. Dengan etos kerja pula, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.⁴⁵

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Menurut Prawa, kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁶

Dapat diketahui dari beberapa definisi mengenai kesejahteraan di atas bahwa kesejahteraan itu adalah merupakan peningkatan taraf hidup seseorang ataupun masyarakat sehingga dapat terpenuhinya segala kebutuhan dasar yang menjadikan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian

⁴⁵Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah: Vol. 13 No. 1, April 2017), h. 76-82

⁴⁶Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, (Jurnal Geografi: Vol. 9 No. 1, 2017), h. 57

masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator yang bisa digunakan didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Melihat dari kondisi masyarakat di Desa Selotong, indikator kesejahteraan yang digunakan peneliti sebagai alat ukur kesejahteraan di Desa Selotong adalah indikator kesejahteraan menurut BPS, karena kriteria miskin yang digunakan BPS lebih sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Sedangkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN lebih tepat digunakan di daerah perkotaan.

3. Pengertian Kesejahteraan (*Falah*) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kata *al-falah* dengan segala derivasinya di dalam Alquran ditemukan dalam 40 tempat. Kata turunan selanjutnya dari *al-falah* adalah *yuflihu*, *yuflihani*, *tuflihu*, *yuflihna* (semua kata itu tidak ada dalam Al-Quran), dan *tuflihuna* (disebut sebelas kali dalam Al-Quran dan selalu didahului dengan kata *la'allaikum*. Makna *la'allaikum tuflihuna* adalah supaya kalian berbahagia). *Falah* menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu; kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu untuk kehidupan akhirat, dijelaskan oleh Al-Asfahani di dalam Mu'jamnya, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.⁴⁷

Muhammad Akram Khan⁴⁸ menjelaskan bahwa *falah* secara literal berarti untuk berkembang, untuk menjadi bahagia, memiliki keberuntungan atau kesuksesan. Sedangkan secara teknis menyiratkan arti sukses di akhirat. *Falah* dibangun atas dasar percaya kepada Allah,

⁴⁷Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 67-68

⁴⁸Isnaini Harahap, M.ridwan, *The Handbook Of Islamic Economis*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 29

rasulullah, kehidupan di akhirat dan perilaku sehari-hari sesuai dengan syariah. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi seperti itu, harus memfasilitasi pencapaian *falah* di tingkat individu dan kolektif. Dengan melihat berbagai kondisi *falah* sebagai berikut :

- a. Kondisi spiritual *falah*, adalah kerendahan hati dalam doa, kesadaran terhadap Allah (*taqwa*), mengingat Allah, syukur kepada Tuhan, bertaubat dan pemurnian batin.
- b. Kondisi ekonomi untuk *falah*, adalah belanja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*zakat* dan *infaq*) menghindari *riba*, memenuhi perjanjian, menghindari eksploitasi, mencari nafkah dengan bekerja keras dan menghindari kekikiran.
- c. Kondisi budaya *falah*, adalah sistem doa, mengejar pengetahuan, kesucian seksual, larangan minuman keras dan perjudian, pemurnian lingkungan.
- d. Kondisi politik *falah*, adalah *jihad* dan *musyawah* (konsultasi).

Ekonomi Islam mempelajari kondisi ekonomi *falah*. *Falah* adalah konsep dunia akhirat, yang menyiratkan rekonstruksi karakter manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan standarhidup minimum dan lingkungan yang bersih untuk seluruh penduduk, juga menunjukkan harga diri, kemandirian dan jiwa yang dimurnikan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *falah* adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh

dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sekaligus sosial. Manusia akan merasa jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valueable*) dibandingkan kehidupan dunia.⁴⁹

Bagaimana manusia mampu mencapai *falah* sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan ada pada dirinya oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta.⁵⁰

Dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah *syara'* yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dikatakan *maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *maslahah*. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat,

⁴⁹Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 29-30

⁵⁰*Ibid.*, h. 30

karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara'* di atas maka dikatakan *masalahah*.⁵¹

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *masalahah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *Maslahah daruriyah*, *masalahah hajiyah* dan *masalahah tahsiniyah*. Jika dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada *masalahah ammah* dan *masalahah khassah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, *masalahah* ada dua yaitu: *masalahah sabitah*, yaitu *masalahah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *masalahah mutaqqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *masalahah* menurut *syara'*, *masalahah* terbagi kepada: *masalahah mu'tabarah*, *masalahah mulghah* dan *masalahah mursalah*.⁵²

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama

⁵¹Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, *Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, (Journal Analytica Islamica: Vol. 5, No. I, 2016), h. 57

⁵²*Ibid.*, h. 57

Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁵³

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah,. Yang telah memberikan makanan dari kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa; *pertama*, kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah SWT. Ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. *Kedua*, adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi). Dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih

⁵³Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, (Equilibrium: Vol. 3, No. 2, Desember 2015), h. 388

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.

lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas. *Ketiga*, adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Untuk indikator kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro yaitu sebagai berikut⁵⁵ :

Tabel 2.1
Aspek Mikro Dan Aspek Makro Dalam Falah

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelangsungan hidup bio-logis; kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya 2. Kelangsungan hidup eko-nomi; kepemilikan faktor produksi 3. Kelangsungan hidup sosial; persaudaraan dan harmoni hubungan sosial 4. Kelangsungan hidup politik; kebebasan dalam partisipasi politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keseimbangan ekologi dan lingkungan 2. Pengelolaan sumber daya alam 3. Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk 4. Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok 5. Jati diri dan kemandirian
Kebebasan Berkeinginan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbebas dari kemiskinan 2. Kemandirian hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk 2. Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang

⁵⁵Ulfa Jamilatul Farida, *Memahami Konsep Al-falah Melalui Penguatan Ketahanan Pangan dalam World Islamic Economic Forum (WIEF)*, (Journal of Islamic Economic Lariba: Vol 1, No. 1, 2015)

Kekuatan dan Harga Diri	1. Harga diri 2. Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehor-matan	1. Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang 2. Kekuatan militer
-------------------------	--	---

C. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.⁵⁶

Menurut Chester I Barner menjelaskan arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut : “bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicapai dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Dilain pihak efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat”.⁵⁷

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam

⁵⁶Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), h. 31

⁵⁷Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 73

melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana targetnya sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pada dasarnya efektivitas secara umum menunjukkan yaitu pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa juga dikaitkan dengan efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas itu lebih menekankan kepada hal yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan dilakukan harus tepat, jika tidak tepat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau dengan kata lain dikatakan tidak efektif.

2. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*). Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁸

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKH dan BPNT}}{\text{Target Penerimaan PKH dan BPNT yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Setelah melakukan pengukuran untuk efektivitas, maka tingkat efektivitas dapat diberikan penilaian menggunakan persentase dan kriteria yang disusun sebagai berikut:

⁵⁸Vera Sri Endah Cicilia, Sri Murni, Daisy M. Engka, *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi), h. 6

Tabel 2.2
Ukuran Efektivitas

PERSENTASE	KRITERIA
100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Di bawah dari 60 %	Tidak Efektif

3. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM). Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

- a. Indikator *masukan*, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator *proses*, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Indikator *keluaran*, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
- d. Indikator *manfaat*, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.
- e. Indikator *dampak*, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika

tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.⁵⁹

Kemudian efektivitas dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sama juga didefinisikan dari PKH yaitu sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan BPNT dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Menurut Sutrisno⁶⁰ menjelaskan bahwa ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:

a. Pemahaman program

Pemahaman program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan atau stakeholder mengetahui dan memahami kegiatan program serta mengenal sosialisasi tentang e-Warong tersebut.

b. Tepat sasaran

Tepat sasaran yaitu, dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukkan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

c. Tepat waktu

Merupakan jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tata kelola e-Warong adalah proses pencairan dana bantuan sosial melalui e-Warong, harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

⁵⁹Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 52-53

⁶⁰Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: Kencana, 2007), h. 125-126

d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu, diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program, maupun dengan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program.

e. Perubahan nyata

Dapat diukur melalui sejauh mana pelaksanaan kegiatan e-Warong memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.⁶¹

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya

⁶¹Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 4, No. 1), h. 90

Manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang mendukung peningkatan taraf kesejahteraan. Tujuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meliputi:

- a. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- b. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas kesehatan.
- c. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.⁶²

3. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Berkenaan dengan hak yang didapat oleh peserta PKH yaitu meliputi: mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program, mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga, dan terdaftar mendapatkan program-program komplementaris dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban ataupun kriteria yang harus dilakukan oleh peserta PKH yaitu meliputi:

- a. Kewajiban komponen kesehatan: peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan, peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.
- b. Kewajiban komponen pendidikan peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga

⁶²Bambang Widiyanto, *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: 21 November 2012), h. 34

pendidikan dasar (SD/MI/SLB/Salafiyah Ula/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan kehadiran minimal 85% dari hasil belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

- c. Kewajiban komponen kesejahteraan sosial: penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*). Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti kegiatan *home care* dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah. (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016).⁶³

4. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran dana bansos PKH 2019 sifatnya nonflat dengan rincian dalam Tabel 2.1 Bantuan tetap hanya diberikan pada tahap pertama setiap tahun. Sementara itu, bantuan komponen diberikan kepada maksimal empat anggota keluarga yang memenuhi komponen program dan nilai bantuan disebar pada tiga tahap berikutnya setiap tahun.

⁶³Dewi Jasmina, Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Hak dan Kewajiban Peserta PKH*, tersedia di: <http://www.yandatin.kemsos.go.id>, (diakses pada Jumat, 22 November 2019)

Tabel 2.3
Nilai Manfaat Tahunan PKH 2019 Menurut Komponen

No	Komponen	Subkomponen	Nilai Manfaat Per Tahun (Rp)
1	Bantuan Tetap	a. Reguler	550.000
		b. PHK Akses	1.000.000
2	Bantuan Komponen Kesehatan	a. Ibu hamil/ Anak usia 0 s.d 6 tahun	2.400.000
		b. Anak SD/ Sederajat	900.000
3	Bantuan Komponen Pendidikan	a. Anak SMP/ Sederajat	1.500.000
		b. Anak SMA/ Sederajat	2.000.000
4	Bantuan Komponen Kesehatan Kerja	a. Lanjut Usia 60 tahun ke Atas	2.400.000
		b. Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000

Sumber: Presentasi Dir-JSK, Ditjen Linjamsos: "Pelaksanaan PKH 2019 dan Evaluasi 2018" (Kemensos, 2019)⁶⁴

Dana bansos PKH disalurkan secara non tunai ke rekening Pengurus PKH yang diakses kartu debit "Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)". Selama satu tahun anggaran, dana bansos PKH disalurkan dalam empat tahap, yaitu tahap pertama (Januari), kedua (April), ketiga (Juli), dan keempat (Oktober). Untuk setiap tahap penyaluran, dir-JSK mengeluarkan SK yang menetapkan besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi penyaluran dana bansos PKH. Penetapan tersebut berdasarkan hasil verifikasi atau pemutakhiran data KPM selama periode tiga bulan oleh Pendamping Sosial PKH. SK menjadi dasar pengajuan data bayar sebulan sebelum jadwal penyaluran.

⁶⁴Dewi Jasmira, Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Hak dan Kewajiban Peserta PKH*, tersedia di: <http://www.yandatin.kemensos.go.id>, (diakses pada Jumat, 22 November 2019)

5. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi: pembukaan rekening KPM, sosialisasi dan edukasi, distribusi KKS, penyaluran dana bansos, penarikan dana bansos, rekonsiliasi hasil penyaluran dana bansos, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.⁶⁵

E. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai *pilot project* dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional. Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai yang dilaksanakan pada tahun 2017 baru dilakukan pada 44 Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan pola natura (Rastra). Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).⁶⁶

⁶⁵TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*, h. 9

⁶⁶Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, *Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, Juni 2018), h. 2

2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM, memberikan pilihan dan kendali KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan juga mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Goals/SDGs*). Kemudian untuk manfaat adanya BPNT adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatnya transaksi nontunai untuk mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), dan juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang usaha penjualan beras dan/atau telur.⁶⁷

3. Prinsip Utama Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Prinsip utama BPNT adalah sebagai berikut:

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM
- c. Mendorong usaha eceran rakyat
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM
- e. *E-warong* (elektronik warung gotong royong) dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber
- f. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana kepada rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.⁶⁸

⁶⁷TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019*, h. 2

⁶⁸*Ibid.*, h. 2

4. Besaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp 110.000 yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada masing-masing KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Pada 2019, BPNT digunakan hanya untuk membeli beras dan/atau telur di e-warong.⁶⁹ Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama pengurus keluarga. KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaatan bansos wajib dibawa oleh KPM.

5. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk mekanisme dalam pelaksanaan BPNT meliputi beberapa tahapan, yaitu meliputi: tahap persiapan, tahap sosialisasi dan edukasi, tahap registrasi/distribusi KKS, tahap penyaluran BPNT, dan tahap pemanfaatan. Dengan kriteria untuk para penerima BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di Kabupaten/Kota yang melaksanakan BPNT dan namanya termasuk di dalam Daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.⁷⁰

⁶⁹*Ibid.*, h. 2

⁷⁰*Ibid.*, h. 3-5

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Selotong

1. Letak dan Luas Desa

Desa Selotong adalah salah satu dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Desa Selotong terbentuk dari 9 Dusun memiliki luas wilayah \pm kurang lebih 6838 Ha, dengan luas pemukiman 486480.000 ham², luas persawahan 450450.000 ham², luas perkebunan 650650.000 ham², luas kuburan 1.515.000 ham², luas perkarangan 12.548.600 ham², luas perkantoran 220.000 ham², dan luas prasarana umum lainnya 550.000 ham². Desa Selotong memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.616 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.401 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.215 jiwa yang terbagi dalam 1.546 KK dan mata pencaharian utama masyarakatnya yaitu Petani 50%, Nelayan 40%, dan lain-lain 10%. Secara geografis batas-batas wilayah di Desa Selotong adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Batas-Batas Wilayah Desa Selotong

No	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Jaring Halus	Secanggang
2	Sebelah Selatan	Karang Gading	Secanggang
3	Sebelah Timur	Pantai Gading	Secanggang
4	Sebelah Barat	Secanggang	Secanggang

Sumber: Kantor Desa Selotong Kec.Secanggang Kab.Langkat⁷¹

⁷¹Kantor Desa Selotong, *Daftar Isian Potensi Desa 2019*

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Selotong yaitu sebanyak 4.616 jiwa yang terdiri dari 2.401 jiwa laki-laki dan 2.215 jiwa perempuan. Dimana dari seluruh jumlah penduduk tersebut terdapat 1.546 Kepala Keluarga (KK).

a. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Adapun tingkat pendidikan penduduk di Desa Selotong sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	60	50
2	Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	35	30
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	300	407
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	20	10
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	10	10
7	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	200	100
8	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	120	125
9	Tamat SD/Sederajat	130	135
10	Tamat SMP/Sederajat	170	180
11	Tamat SMA/Sederajat	180	185
12	Tamat D-1/Sederajat	25	28
13	Tamat D-2/Sederajat	2	3
14	Tamat D-3/Sederajat	30	30
15	Tamat S-1/Sederajat	40	50
16	Tamat S-2/Sederajat	-	-
17	Tamat S-3/Sederajat	-	-
18	Tamat SLBA	-	-
19	Tamat SLBB	-	-
20	Tamat SLBC	-	-
	Jumlah	1.322	1.343

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Desa Selotong yang tidak melanjutkan pendidikannya. Jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah paling banyak di SLTP sebanyak 300 orang, dan jumlah penduduk yang tamat sekolah paling banyak yaitu di SMA/Sederajat sebanyak 365 orang. Tetapi meskipun begitu tidak ada masyarakat Desa Selotong yang usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah. Dari usia 7-18 tahun semua merasakan bangku sekolah.

b. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Adapun mata pencaharian pokok penduduk di Desa Selotong adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	752	350
2	Buruh Tani	450	450
3	Buruh Migran	100	50
4	Nelayan	460	5
5	Pegawai Negeri Sipil	40	45
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5	5
7	Pedagang Keliling	85	50
8	Peternak	150	95
9	Bidan Swasta	-	2
10	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5	-
	Jumlah	2.137	1.052

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Desa Selotong yaitu petani dan

nelayan. Hal ini mengingat bahwa Desa Selotong memiliki potensi perairan dan perkebunan yang tinggi.

B. Tingkat Kemiskinan Desa Selotong

1. Perekonomian Masyarakat

Untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam perekonomian masyarakat yang ada di Desa Selotong dapat dilihat dari usia angkatan kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Usia Angkatan Kerja

NO	USIA	JUMLAH	
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	65	Orang
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	270	Orang
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	251	Orang
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	263	Orang
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	150	Orang
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	10	Orang
7	Jumlah penduduk usia 18- 56 tahun yang cacat dan bekerja	5	Orang

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan perekonomian masyarakat Desa Selotong dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, jumlah usia 18-56 tahun sebanyak 263 orang yang bekerja penuh. Kemudian di usia 18-56 tahun ini juga ada sebanyak 270 orang pengangguran atau dikatakan tidak bekerja karena masih duduk di bangku sekolah.

2. Kesejahteraan Keluarga

Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) membagi indikator kesejahteraan pada 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

a. Tahap *pra sejahtera*

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.

b. Tahap *sejahtera I*

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.

c. Tahap *sejahtera II*

Secara operasional mereka tampak *tidak mampu* memenuhi salah satu indikator seperti keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang, makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, dan memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah.

d. Tahap *sejahtera III*

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator seperti memberikan sumbangan materil secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

e. Tahap *sejahtera III plus*

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.⁷²

⁷²Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, (update 22 Oktober 2019)

Adapun tahapan kesejahteraan keluarga pada masyarakat Desa Selotong sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kesejahteraan Keluarga

1	Jumlah Keluarga Prasejahtera	309 Keluarga
2	Jumlah Keluarga Sejahtera 1	405 Keluarga
3	Jumlah Keluarga Sejahtera 2	220 Keluarga
4	Jumlah Keluarga Sejahtera 3	240 Keluarga
5	Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	100 Keluarga
	Jumlah	1.274 Keluarga

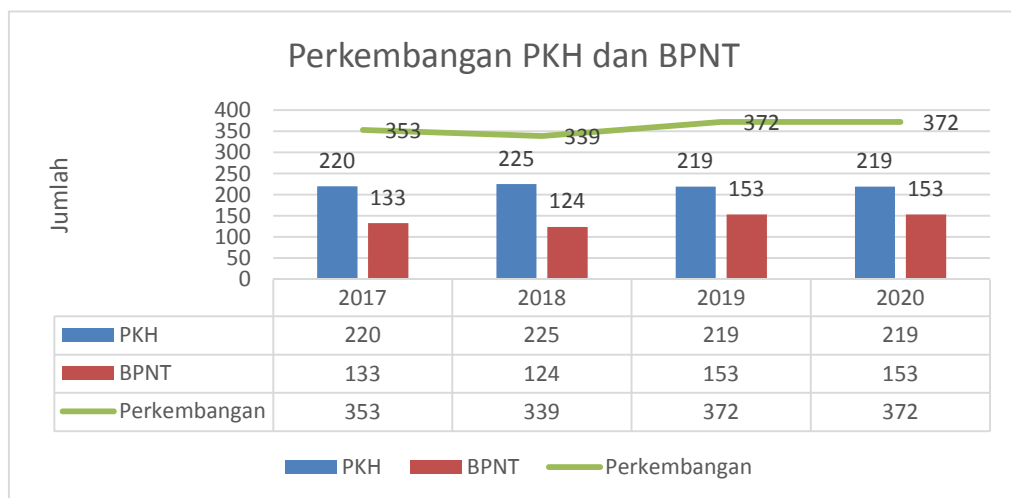
Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Selotong rata-rata berada pada tahap Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. Keluarga Prasejahtera artinya keluarga yang belum dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan agama. Sedangkan keluarga Sejahtera 1 adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong

Desa Selotong yang merupakan salah satu desa di Kec. Secanggang Kab. Langkat ini dimana masih mendapatkan bantuan PKH dan BPNT untuk masyarakat miskin disana. Untuk itu peneliti ingin mengetahui perkembangan PKH dan BPNT di desa tersebut. Dan mengenai perkembangan yang terjadi untuk bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong mulai tahun 2017-2020 dapat dilihat dari sebuah grafik di bawah ini.



Grafik 4.1

Perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong

Pada grafik 4.1 tentang perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong didapatkan hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa untuk perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong mulai tahun 2017 sampai 2020. Disini dimulai dari tahun 2017 yang menerima bantuan PKH dan BPNT berjumlah 353 KK sebagai masyarakat miskin penerima bantuan, kemudian di tahun berikutnya yaitu untuk tahun 2018 yang menerima bantuan PKH dan BPNT berjumlah 339 KK. Kemudian untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2020 yang menerima PKH dan BPNT berjumlah 372 KK.

Dapat diketahui bahwa untuk tiap tahun jumlah penerimaan PKH dan BPNT mengalami perubahan, hanya tahun 2019-2020 jumlah penerima PKH dan BPNT masih tetap. Jadi dengan demikian untuk perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini mulai tahun 2017-2020 mengalami perubahan, yaitu penerima PKH dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, sedangkan untuk BPNT mulai tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Dan selanjutnya penerima PKH di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, dan untuk BPNT di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Dari keadaan di Desa Selotong tentang perkembangan PKH dan BPNT bagi masyarakat miskin penerima bantuan ini mengalami fase naik turun untuk setiap bantuan pertahunnya, hanya di tahun 2019-2020 yang masih tetap tidak mengalami perubahan. Untuk jumlah penerimaan ini berubah disebabkan beberapa faktor, yaitu karena dari penerima sudah meninggal dunia, kemudian ada beberapa yang mengundurkan diri dan juga ada yang sudah di blokir dari penerima PKH dan BPNT.

B. PKH dan BPNT Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dapat diketahui bahwa mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yaitu PKH dan BPNT untuk masyarakat miskin adalah bentuk perlindungan sosial untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan tujuan jangka panjang diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini dapat memutus rantai kemiskinan.

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin ini menunjukkan bahwa kepedulian akan sesama manusia untuk saling tolong menolong atau dengan kata lain manusia adalah sebagai makhluk sosial. Jadi dalam ajaran Islam sangat dianjurkan umatnya itu untuk saling tolong menolong.

Dalam Islam ada ketergantungan sesama manusia, karena tidak dapat hidup sendiri. Adanya kehendak dan usaha dari manusia untuk memperoleh apa yang diinginkan, tapi itu hanyalah sebagian karena yang lainnya tidak

terhitung banyaknya berada di luar kemampuan manusia. Jadi apa yang diinginkan manusia itu tidak tercapai kecuali karena semuanya sudah terpenuhi. Semua manusia berada di bawah kuasa Allah SWT. Atas kuasa-Nya lah kita membutuhkan-Nya serta tidak dapat mengelak dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Islam yang sebagai agama sempurna mengatur aspek dan kehidupan manusia dengan memberikan solusi atas permasalahan ataupun problematika yang terjadi pada kehidupan manusia seperti masalah dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan mengatasi masalah kemiskinan ini, Islam berusaha mencari solusi dan mengawasi dampak yang akan terjadi supaya bisa memelihara kehidupan rumah tangga, adanya perlindungan sosial, dan mewujudkan jiwa persaudaraan yang tinggi agar setiap manusia memiliki taraf hidup yang layak.

Jadi dengan demikian dari adanya bantuan PKH dan BPNT yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin supaya bisa mengentaskan masalah kemiskinan sesuai dengan ajaran Islam, dengan adanya bantuan PKH dan BPNT ini dan juga dalam Islam memiliki tujuan yang sama. Supaya ada perlindungan sosial yang didapat oleh manusia.

Akan tetapi dalam Islam untuk setiap masyarakat yang menerima bantuan PKH dan BPNT agar ini tidak hanya mengharapkan bantuan saja tanpa mau bekerja dan berusaha. Dengan adanya bantuan ini semakin menambah semangat untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kehidupannya tidak menjadikan manusia menjadi malas karena hanya mengharapkan bantuan yang diberikan.

Dalam perspektif Islam mengentaskan kemiskinan dengan bantuan PKH dan BPNT ini, pemerintah yang memberikan bantuan sosial ini berkewajiban melindungi masyarakat miskin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Tentunya masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan sosial dengan implementasi dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai, “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.⁷³

Dari penerapan adil dalam menyangkut penerimaan program bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong yang dirasakan adalah masih kurang tepat sasaran untuk menentukan peserta penerima bantuan, karena yang mendapatkan bantuan tidak sepenuhnya masyarakat miskin melainkan orang yang mampu juga mendapatkan. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program bantuan PKH dan BPNT yang ada di Desa Selotong. Oleh karena itu dalam perspektif ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan dengan melalui adanya program bantuan sosial ini masih kurang efektif karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan.

2. Tanggung Jawab

Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal; makmur dan adil.

Untuk implementasi bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini belum ada tanggung jawab secara penuh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan PKH dan BPNT ini

⁷³Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: Maret, 2018), h. 95

masyarakat penerima bantuan ditentukan berdasarkan data-data lama, sehingga terdapat masyarakat yang sudah beralih status sosialnya masih saja mendapatkan bantuan PKH dan BPNT karena data yang ada di pemerintah masih tergolong data lama masyarakat miskin sehingga masyarakat yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan ini tidak termasuk peserta penerima bantuan dengan alasan belum terdata dan akan mendapat bantuan di waktu berikutnya. Dengan demikian proses bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini belum terealisasi secara baik dan juga untuk tanggung jawab belum secara penuh dilakukan oleh petugas ataupun pengelola program bantuan PKH dan BPNT ini.

3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut.⁷⁴

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Negara menunaikan kewajiban ini dalam bentuk. *Pertama*, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini, bentuk *kedua* adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.⁷⁵

⁷⁴Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Economica: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. 8, No. 2, 2017), h. 241

⁷⁵*Ibid.*, h. 245

Seperti halnya PKH dan BPNT yang ada di Desa Selotong ini yang memberikan jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin penerima bantuan, sehingga dalam keluarga masyarakat penerima bantuan ini adanya bantuan sosial untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kemudahan dalam mengakses bantuan untuk pendidikan dan kesehatan tersebut. Dan untuk implementasi program bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong ini jika dilihat dari perspektif ekonomi Islamnya untuk jaminan sosial dengan perlindungan sosialnya ini kepada masyarakat dapat dirasakan dengan baik dengan adanya bantuan untuk pendidikan dan kesehatan yang didapatkan.

Dengan demikian, PKH dan BPNT dalam perspektif ekonomi Islam dari ketiga konsep nilai-nilai ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan dilihat berdasarkan analisis dan kondisi di atas implementasinya yaitu PKH dan BPNT yang ada di Desa Selotong kurang dalam berlaku adil karena masih ditemukan tidak tepat sasaran dalam menentukan masyarakat miskin penerima manfaat dan kurangnya tanggung jawab yang dilakukan secara penuh, disini PKH dan BPNT hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima manfaat ini.

C. Efektivitas PKH dan BPNT di Desa Selotong

Untuk mengetahui efektivitas dari adanya bantuan PKH dan BPNT ini peneliti mengukurnya dengan rumus ukuran efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKH dan BPNT}}{\text{Target Penerimaan PKH dan BPNT yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Dimana setelah mengetahui akan perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong hingga tahun 2020 ini penerima bantuan PKH dan BPNT mencapai 372 KK. Kemudian untuk target yang direkomendasikan dari pihak

Desa Selotong berjumlah 683 KK. Dengan demikian yang sudah terealisasi berjumlah 372 KK penerima bantuan sampai pada tahun 2020 ini.

Selanjutnya realisasi dan target penerimaan bantuan PKH dan BPNT ini dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas dengan rumus efektivitas yang ada diatas yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKH dan BPNT}}{\text{Target Penerimaan PKH dan BPNT yang ditetapkan}} \times 100\% \\ &= \frac{372}{683} \times 100\% \\ &= 54\% \end{aligned}$$

Didapatkan hasil 54%. Dimana 54%, inilah hasil dari rasio efektivitas bantuan PKH dan BPNT. Hasil yang didapatkan dari data perkembangan PKH dan BPNT tahun 2020 ini yang sudah peneliti bahas di perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong, dimana pembagian realisasi penerimaan PKH dan BPNT yang berjumlah 372 KK dengan target penerimaan PKH dan BPNT yang ditetapkan ataupun direkomendasikan dari pihak pemerintahan Desa Selotong yang berjumlah 683 KK. Maka didapatkan hasil 54% ini untuk rasio efektivitas mengenai PKH dan BPNT ini.

Dan setelah melakukan pengukuran untuk rasio efektivitas ini, maka tingkat efektivitas dapat diberikan penilaian menggunakan persentase dan kriteria yang disusun sebagai berikut:

PERSENTASE	KRITERIA
100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Di bawah dari 60 %	Tidak Efektif

Tabel di atas adalah ukuran efektivitas yang digunakan setelah mengetahui hasil pengukuran dari rasio efektivitas seperti di atas. Karena melihat dari hasil data perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong dengan realisasi penerimaan hanya 372 KK, sedangkan target penerimaan

yang seharusnya mendapatkan PKH dan BPNT berjumlah 683 KK. Jadi dapat diketahui bahwa untuk hasil efektivitas PKH dan BPNT dengan rasio efektivitas didapatkan hasil = 54%. Data 54% tersebut didapat dari hasil rasio efektivitas dengan melihat data perkembangan untuk PKH dan BPNT tahun 2020 yang sudah peneliti bahas di atas. Selanjutnya dengan melihat persentase 54% ini dimana hasil yang masih dibawah 60% ini menunjukkan kriteria yang tidak efektif.

Dengan adanya bantuan sosial ke masyarakat miskin yang menerima di Desa Selotong PKH dan BPNT ini, peneliti menyimpulkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini berjalan tidak efektif. Karena di Desa Selotong ini untuk bantuan PKH dan BPNT ini belum mencapai target ukuran efektivitas yang mencapai 90% - 100% supaya dapat dikatakan bantuan PKH dan BPNT ini efektif. Dengan demikian melihat data yang ada di Desa Selotong ini efektivitas PKH dan BPNT ini masih jauh dari yang diharapkan.

D. Dampak PKH dan BPNT Terhadap Masyarakat Desa Selotong

Pada hakikatnya, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa bantuan PKH dan BPNT ini adalah upaya perlindungan sosial yang mana bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Desa Selotong. Untuk itu, demi mengetahui dampak PKH dan BPNT terhadap masyarakat yang ada di Desa Selotong peneliti melakukan wawancara dengan 12 responden, yaitu para penerima bantuan PKH dan BPNT ini kemudian melakukan wawancara juga ke pemerintahan Desa Selotong. Seperti pernyataan hasil wawancara sebagai berikut:

Ibu Sulasmi (45 tahun) mengatakan “saya menerima ya sudah 2 tahun ya..., ya senang karena terbantu untuk sekolah tadi, kan untuk sekolah kan ya alhamdulillah senang lah. Ya pokoknya kalau pas bayaran apalah eceknnya... teratasi itukan, duit itu tidak sempat untuk yang lain. Untuk sekolah ajalah memang asal pas keluar untuk bayar sekolah.”⁷⁶

⁷⁶ Sulasmi, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Siti Masitah (50 tahun) “kalau saya ya syukur alhamdulillah lah, bantuan ini kan pertama untuk anak sekolah. Ya masalah beras kan perekonomian menambah ekonomi sehari-hari. Hah... hampir 2 tahun lah, karena kami usulan pun di tahap yang kedua. Ya kalau saya pas mungkin ya... ada yang enggak. Hah.. gitu ada yang pas, ada yang punya sawah ada yang mampu ada yang punya kereta itu dapat, Cuma saya terus terang karena gak ada rumah pun numpang hah.. itu pas kalau untuk saya tapi kalau yang lain ntah.”⁷⁷

Kemudian sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Nuraini (44 tahun) “Hah... ibu inikan yang ditahap pertama, jadi sudah sekitar 4 tahun mendapat bantuan. PKH itu bantuan yang orang miskin lah, ekonomi miskin. Ya perasaan ibu ya senang, hah.. kan membantu yakan untuk sekolah, ya pokoknya kalo pas ada bayar sekolah bisa terbantu, karena biasa keluar disitu butuh untuk sekolah disitu bantuannya keluar.”⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas, untuk masyarakat miskin penerima bantuan PKH dan BPNT ada yang menerima di tahap 1 dan ada yang menerima di tahap 2. Selisih dari kedua tahap ini adalah 2 tahun, jadi di tahap 1 sudah 4 tahun berjalan sampai saat ini dan di tahap 2 sudah 2 tahun berjalan sampai sekarang. Kemudian mengenai gambaran bantuan PKH dan BPNT hasil yang didapat adalah bahwa ada yang merasa memang layak menerima karena tidak memiliki rumah hanya menumpang, tidak memiliki sawah ataupun kendaraan. Dan begitupun sebaliknya ada yang memiliki rumah, sawah dan kendaraan dapat bantuan juga. Selanjutnya, untuk mengenai bagaimana perasaan dan pendapat dengan adanya bantuan PKH dan BPNT ini didapatkan hasil bahwa ibu-ibu yang menerima bantuan ini senang, syukur alhamdulillah. Karena bantuan ini yang PKH digunakan untuk biaya anak sekolah dan BPNT mendapat bantuan beras digunakan untuk makan sehari-hari.

⁷⁷Siti Masitah, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

⁷⁸Nuraini, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

Untuk selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Ibu Santi Handayani (41 tahun) mengatakan “untuk prosedur menerima bantuan ini ya syaratnya inikan dari atasan dari pemerintah bantuannya, dan tiba-tiba waktu itu memang dikumpulkan di balai desa. Syaratnya itulah KTP sama Kartu Keluarga (KK) dan juga rapor anak sekolah. Kalau masih ada anak sekolah kalau tidak ada lagi yang sekolah ya diputuskan bantuan itu. Ini bantuan sampai SMA aja dapat dimulai dari anak masih SD.”⁷⁹

Hal yang sama kemudian disampaikan oleh Ibu Ernawati (48 tahun) “untuk bisa dapat bantuan ini ya awalnya sudah di data terus dikumpulkan di balai desa. Setelah itu ya syaratnya kayak KTP, KK gitu yang di pakai. apalagi anakku kadang-kadang ada yang mau tamat yakan, hah.. apa itu pembayaran kan banyak kan, keluarlah itu sementara syukur alhamdulillah terbantu. Jadi bisa beli baju, sepatu, kebutuhan anak sekolah.”⁸⁰

Kemudian untuk mengenai hasil yang dicapai dari program bantuan PKH dan BPNT sudahkah mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong, Ibu Doniyem (51 tahun) mengatakan “kalau cerita kurangnya manusia ini gak ada cukupnya, hah.. pasti kurang aja dikasih berapa pun, tapi ya alhamdulillah ada bantuan kita syukurin aja apa adanya, kalau misalnya ada ditambahi ya alhamdulillah, ya cemani... namanya kita apa dari atasan yaitu pemerintah kalau dapatnya berapa dikasih pemerintah terima. Itu apapun ceritanya.”⁸¹

Kemudian dari Ibu Poninten (49 tahun) mengatakan “ya udah ya, ya kita cemani ini masyarakat ya mensyukuri aja kan, berapa dapatnya berapa apanya ya syukurin aja, itu ajalah. Ya arahnya untuk itu tadi membantu masyarakat miskin apalagi bantuan untuk biaya anak sekolah kan ya.. disini ya dari tahap 1 sampe tahap 2 masih sama sih gitu aja yang di kasih. Masih campur yang benar-benar layak sama yang mampu masih dapat.”⁸²

⁷⁹Santi Handayani, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

⁸⁰Ernawati, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

⁸¹Doniyem, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

⁸²Poninten, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

Dari hasil wawancara di atas untuk mengenai pemahaman akan prosedur bagi masyarakat yang menerima bantuan, apakah sudah mampu menjawab masalah kemiskinan didapatkan hasil bahwa masyarakat penerima bantuan ini, ibu-ibunya mengikuti prosedur yang diberikan pemerintah dengan dikumpulkannya di balai desa dengan membawa persyaratan KTP, KK, dan rapor anak sekolah. Dan selanjutnya setelah menerima bantuan ini yang tujuannya bisa menjawab masalah kemiskinan namun namanya manusia ketika menerima bantuan pasti tidak ada cukupnya, kalau bisa bantuan itu ditambah dan sebagian responden bisa bersyukur alhamdulillah atas bantuan yang diberikan dan lebih memilih terima apa adanya atas berapa pun bantuan yang diberikan. Dan hal yang satu lagi adalah arah program yang diberikan pemerintah masih tetap dari yang sebelumnya. Dari tahap 1 dan tahap 2 yang sudah berjalan arah kebijakannya masih belum pas yaitu masih bercampur antara yang benar-benar layak menerima bantuan dengan yang tidak.

Untuk wawancara yang selanjutnya mengenai sanksi, besaran bantuan, mekanisme penerimaan dan harapan bagi para penerima bantuan dari Ibu Nur Ningsih (44 tahun) mengatakan “ada sanksi kalau ibu tidak datang selama 3 bulan, enggak datang bisa ditarik kembali. Kami setiap bulan kumpulan, hah.. sanksi lain dilihat dimana para penerima PKH kok masih ada gizi buruk, itu disanksikan juga. Karena pemerintah kan ngasih telur, hah.. supaya anggota PKH gizinya balitanya atau bayinya harus sehat.”⁸³

Kemudian dari Ibu Salmiah (51 tahun) mengatakan “dari gesekan kita itu ATM dari BRI langsung dari bank melalui BRI link. Kami BRI link aja nanti dikasih tau, eh PKH keluar, kami gesek ada itu yang ngasih tau, yang ngasih tau pengurusnya nanti di telponkan ada kelompok, ketua kelompoknya ada. Setiap kelompoknya didatengi kasih arahan, nanti kalau datang bantuan itu nantikan kamikan udah punya ATM nanti kedengaran itu, ini beras keluar. Dari Dusun 7 warung Surya sama Secanggang ngambil berasnya.”⁸⁴

⁸³ Nur Ningsih, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

⁸⁴ Salmiah, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

Dan selanjutnya dari Ibu Darwati (49 tahun) mengatakan “untuk besaran bantuan inikan 3 bulan sekali dapat dari bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Hah... jadi bulan 4 inikan nanti bulan 7 dapat alhamdulillah, masuk anak sekolah jadi bisa beli seragam sekolah dan kebutuhan lainnya. Kami nggak tentu dapatnya SMA Rp 500.000, SMP Rp 275.000. Ini di awal tahun biasa dapatnya yang banyak karna untuk orang tua juga dapat, jadi gak tentu karena tanggalnya ngaret biasa di awal bulan kadang double kalau pas bulan sebelumnya belum masuk. Untuk harapan kedepan kalau kami bilang ya tergantung atasan yaitu pemerintah kalau bisa ya berlanjut kalau masih ada anak yang sekolah, kayak Ibu yakan masih muda suami Ibu kerjanya mocok-mocok kadang kerja kadang nggak, jadi sangat membutuhkan dengan adanya bantuan yang diberikan.”⁸⁵

Dari wawancara di atas didapatkan hasil bahwa masyarakat penerima bantuan PKH dan BPNT ini ibu-ibunya sudah mengetahui akan adanya sanksi yang diberikan jika melanggar dari ketentuan yang diberikan, dan mekanisme untuk penerimaanya langsung dari ATM BRI dan para ibu-ibu mengambilnya melalui BRI link. Kemudian untuk besaran bantuan yang diterima berbeda-beda untuk tiap tingkatan sekolah untuk SMP bisa Rp275.000 dan SMA Rp500.000 dan dapat diterimanya bantuan ini per 3 bulan sekali dalam setahun. Dan selanjutnya yang diharapkan oleh ibu-ibu para penerima bantuan ini untuk tetap berlanjutnya bantuan ini apalagi jika anaknya masih sekolah, karena sangat membantu sekali membantu biaya pengeluaran. Apalagi dengan kerjaan yang tidak tetap dan sebagian hanya bergantung dari hasil laut dan hasil tani.

Masih berlanjut dengan wawancara, dan kali ini dengan pihak pemerintahan Desa Selotong oleh Ibu Fitriani selaku KASI pemerintahan tentang jumlah penerima PKH dan BPNT saat ini, gambaran PKH dan BPNT di Desa Selotong, partisipasi masyarakat dan pencapaian yang sudah ada di desa Selotong, Ibu Fitriani mengatakan “untuk sampai saat ini dari tahun 2019-2020 penerima PKH dan BPNT berjumlah 372 KK. Untuk gambaran

⁸⁵Darwati, Penerima PKH dan BPNT, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

bantuan ini ya membantu sebenarnya, tapi ada juga ya kecemburuan, membantu keuangan kepala keluarga terutama untuk ibu rumah tangga, mengurangi hah... pembelanjaan, ada tambahan membantu keuangan kepala keluarga, Intinya itu. Untuk partisipasinya ya itu perkumpulan setiap bulannya, kan partisipasinya timbal balik setelah dari mendapat bantuan itu tadi. Dan untuk pencapaian ya bagus, tapi... kalau misalnya dilihat dari jumlah penduduk Selotong yang kurang mampu sih belum efektif. Tapi tak lepas dari itu pemerintah Dersa Selotong tetap berusaha mencari informasi mana masyarakat yang belum terdaftar di penerima PKH dan BPNT. Jadi pemerintah desa itu tidak lepas tangan. Dengan dari Dinsos ada kuota nih tiap tahunnya berapa orang penerimaan, ya tindakan pemerintah desa nggak hanya mengharapkan dari Dinsos. Sementara Dinsos memberikan hanya sekian orang penambahan pemerintah desa tidak langsung iya segitu aja, nggak gitu tapi mencoba melakukan penambahan yang lain.”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas didapatkan hasil bahwa jumlah penerima PKH dan BPNT di Desa Selotong sampai saat ini berjumlah 372 KK, dan bantuan ini memang sangat membantu untuk kepala keluarga membantu keuangan dalam rumah tangga. Tentunya para penerima tidak terlepas dari partisipasi untuk berkumpul setiap bulannya. Dan untuk pencapaian sejauh ini belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan tapi belum terdaftar penerima bantuan. Di sini dari pihak pemerintahan desa tidak begitu lepas tangan walaupun pendataan dari pihak Dinsos, pihak desa mencoba untuk melakukan penambahan penerima bantuan tersebut.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Ibu Fatimah selaku Ibu Sekdes di Desa Selotong untuk mengetahui respon masyarakat yang tidak menerima, adakah kecemburuan sosial, bagaimana bantuan ini merubah perilaku masyarakat, kendala pemerintah desa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga cara pemerintah desa melakukan

⁸⁶Fitianni, KASI Pemerintahan Desa Selotong, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

pemberdayaan masyarakat, Ibu Fatimah mengatakan “pasti ada kecemburuan sosial, karena masyarakat Desa Selotong yang benar-benar layak menerima bantuan tapi belum terdaftar sebagai penerima. Karena bantuan ini ya... belum efektif, karena masih banyak yang belum menerima bantuan. Karena bantuan ini nggak bisa sekaligus semua ada tahapannya. Kalau kami dari Desa pinginnya agar semua dimasukkan tapi dari pemerintah standar kuotanya jadi harus dibatasi. Sebenarnya kalau dilihat merubah perilaku masyarakatnya ya nggak sih. Mereka nggak merubah perilaku kehidupan. Maksudnya merubah dalam arti kayak gini, hmm.. kan berarti kalau orang penerima bantuan kan diatasnamakan tidak mampu, nah mereka malah berpikir bantuan itu memang cocok untuk orang itu, ya jadi orang itu nggak akan merubah. Intinya nggak merubah sih. Karena di Desa ini masih banyak tergolong prasejahtera, lowongan pekerjaan itu yang nggak ada. Karena di desa cuma mengharapakan dari hasil laut sama hasil tani. Intinya dari kendala itu bisa mengubah SDM itu, dan kali ini belum ada cara kita yang efektif merubah pola pikir SDM, kayak gitu sih. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat caranya banyaknya mengundang narasumber untuk membentuk suatu bimbingan, yaitu meningkatkan bimtek mengenai peningkatan SDM itu sendiri.”⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas didapatkan hasil bahwa masih adanya kecemburuan sosial antara orang yang belum menerima bantuan, belum adanya untuk merubah perilaku masyarakat. Karena mereka berpikir bantuan itu memang cocok untuk mereka. Di Desa Selotong dengan masih banyaknya yang masuk golongan prasejahtera, ini yang menjadi kendala untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Dan kemudian upaya yang dilakukan adalah dengan cara banyaknya bimtek dengan mengundang narasumber supaya bisa peningkatan SDM dan merubah pola pikir.

Dari seluruh hasil wawancara baik dari masyarakat penerima dan dari pihak Desa Selotong mengenai dampak PKH dan BPNT terhadap masyarakat Desa Selotong bantuan PKH dan BPNT sangatlah membantu keuangan masyarakat desa apalagi bantuan tersebut seperti PKH digunakan untuk

⁸⁷Fatimah, SEKDES di Desa Selotong, *Wawancara*, di Desa Selotong, 11 Maret 2020

sekolah anak mereka dan BPNT berupa beras digunakan untuk kebutuhan makan. Melihat penerapan PKH dan BPNT yang belum efektif menimbulkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat yang benar-benar layak menerima tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Tentunya ini tidak terlepas dari pihak Dinsos yang melakukan pendataan siapa saja yang berhak menerima, di sini juga perlunya kordinasi yang matang bersama pemerintahan desa dalam penentuan penerima supaya berjalan efektif. Di mana untuk para penerima diharapkan bisa merubah perilaku masyarakat supaya tidak mengharapkan bantuan semata, melainkan adanya upaya untuk bangkit dan tidak terlalu berharap akan bantuan. Memang perlu adanya kesadaran, terlebih bagi masyarakat yang dirasa sudah mampu mungkin bisa melepas dirinya dari terdaftar dari bantuan, bukan hanya berdiam diri. Ini semua supaya tidak ada lagi kecemburuan sosial.

Untuk lebih memperjelas lagi akan dampak dari bantuan PKH dan BPNT terhadap masyarakat Desa Selotong dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel 4.1

Dampak PKH dan BPNT Terhadap Masyarakat Desa Selotong Dengan Melihat Rata-Rata Kesejahteraan Keluarga di Tahun 2020

No	Penerima PKH dan BPNT	Target Penerima PKH dan BPNT	Belum mendapatkan PKH dan BPNT	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Jumlah
1	372 KK	683 KK	311 KK	309 Keluarga	405 Keluarga	714 keluarga

Dari data di atas mengenai dampak PKH dan BPNT terhadap masyarakat Desa Selotong dan juga dengan melihat rata-rata kesejahteraan keluarga di sana yaitu pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Di tahun 2020 ini bahwa penerima PKH dan BPNT ini berjumlah 372 KK dengan target penerima mencapai 683 KK. Tentu antara penerima dan target hasilnya belum sesuai, masih ada 311 KK yang seharusnya mendapatkan PKH dan

BPNT ini. Data ini peneliti dapatkan langsung dari pemerintahan Desa Selotong yang menyimpan data-data tentang masyarakatnya.

Kemudian ketika dilihat dari kesejahteraan keluarga yang ada di Desa Selotong ini yaitu rata-rata pada tahap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Ini sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari profil Isian Desa Selotong. Dimana tahap *pra sejahtera* adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana, dan tahap *sejahtera I* adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.

Dari kedua tahap ini masih menandakan kondisi masyarakat di Desa Selotong masih banyak masyarakatnya yang miskin. Hal ini didasari juga dengan melihat keadaan dan kondisi masyarakat Desa Selotong dengan mata pencaharian dari hasil laut dan hasil pertanian dengan tidak adanya penghasilan yang tetap, terlebih masih banyak yang kerjanya tidak tetap tentu ini membuat kondisi keuangan yang lemah sehingga memerlukan bantuan. Jadi disini agar mencari solusi terbaik supaya awalnya masih tergolong prasejahtera dan sejahtera I bisa naik tahap minimal menjadi keluarga sejahtera II dan seterusnya hingga tidak ada lagi masyarakat di Desa Selotong dikategorikan masyarakat miskin. Tentu yang diharapkan apalagi dari pihak desa tentu mengubah SDM yang ada di Desa Selotong dengan menjad pola pikir yang lebih baik tentu juga tidak terlepas dengan dorongan banyaknya pelatihan dalam peningkatan kualitas SDM.

E. Analisa Penulis

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana temuan penelitian yang sudah dilakukan dengan dikaitkan pada pembahasan

di Bab II dan juga temuan penelitian pada penelitian terdahulu. Hasil analisa penulis sebagai berikut:

1. Perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong

Mengenai perkembangan PKH dan BPNT di Desa Selotong bagi masyarakat miskin penerima bantuan ini untuk tahun 2019-2020 ini mencapai 372 KK penerima PKH dan BPNT. Dan hal yang menyebabkan perubahan jumlah penerimaan ini yaitu karena dari penerima sudah meninggal dunia, kemudian ada beberapa yang mengundurkan diri dan juga ada yang sudah di blokir dari penerima PKH dan BPNT. Hal yang dapat dikaitkan mengenai PKH dan BPNT yaitu:

- a. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.⁸⁸
- b. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai *pilot project* dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional. Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai yang dilaksanakan pada tahun 2017 baru dilakukan pada 44 Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan pola natura (Rastra). Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM,

⁸⁸Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 4, No. 1), h. 90

memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian.⁸⁹

2. PKH dan BPNT dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dari ketiga konsep nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan jaminan sosial dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong ini kurang dalam berlaku adil karena masih ditemukan tidak tepat sasaran dalam menentukan masyarakat miskin penerima manfaat dan kurangnya tanggung jawab yang dilakukan secara penuh, disini PKH dan BPNT hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima manfaat.

Hal ini dapat dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan menurut Quraisy Shihab⁹⁰ yaitu pada kewajiban pemerintah. Dalam paradigma Islam, pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin. Dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ^ط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ الْغَيْبِ ^ج بِإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*⁹¹

Pada surat Al-Hadid ayat 25 ini menjelaskan bahwa pemerintah itu merupakan pemimpin yang mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat yang ia pimpin, tidak terlepas akan keadilan, tanggung jawab dan

⁸⁹Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, *Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, Juni 2018), h. 2

⁹⁰Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 38

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011),

jaminan sosial yang diberikan pada masyarakatnya yang termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.

Dengan penuh komitmen yang harus dilakukan pemerintah untuk masyarakatnya adalah sebuah keadilan, seperti adil dalam pendataan untuk penerimaan PKH dan BPNT agar terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, kemudian harus tetap penuh tanggung jawab dalam proses bantuan PKH dan BPNT untuk masyarakat dan juga tidak terlepas dari jaminan sosial yang diterima masyarakat yaitu seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Efektivitas PKH dan BPNT di Desa Selotong

Untuk efektivitas PKH dan BPNT di Desa Selotong dapat dikatakan belum efektif. Karena di Desa Selotong ini untuk bantuan PKH dan BPNT ini masih mencapai 54%, belum mencapai target ukuran efektivitas yang mencapai 90% - 100% supaya dapat dikatakan bantuan PKH dan BPNT ini efektif. Dengan demikian melihat data yang ada di Desa Selotong ini efektivitas PKH dan BPNT ini masih jauh dari yang diharapkan. Dengan melihat indikator pada variabel yang diukur agar efektif pada PKH dan BPNT, seperti:

- a. Indikator *masukan*, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator *proses*, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Indikator *keluaran*, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
- d. Indikator *manfaat*, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.

- e. Indikator *dampak*, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.⁹²

Indikator di atas untuk PKH itu sendiri dan selanjutnya untuk BPNT dengan indikator:

- a. Pemahaman program

Pemahaman program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan atau stakeholder mengetahui dan memahami kegiatan program serta mengenal sosialisasi tentang e-Warong tersebut.

- b. Tepat sasaran

Tepat sasaran yaitu, dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukkan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

- c. Tepat waktu

Merupakan jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tata kelola e-Warong adalah proses pencairan dana bantuan sosial melalui e-Warong, harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

- d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu, diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program, maupun dengan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program.

⁹²*Ibid.*, h. 52-53

e. Perubahan nyata

Dapat diukur melalui sejauh mana pelaksanaan kegiatan e-Warong memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi masyarakat.⁹³

Dengan demikian tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

4. Dampak PKH dan BPNT Terhadap Masyarakat Desa Selotong

Untuk dampak PKH dan BPNT di Desa Selotong ini, dengan melihat kondisi masyarakat di Desa Selotong masih banyak masyarakatnya yang miskin. Hal ini didasari juga dengan melihat keadaan dan kondisi masyarakat Desa Selotong dengan mata pencaharian dari hasil laut dan hasil pertanian dengan tidak adanya penghasilan yang tetap, terlebih masih banyak yang kerjanya tidak netap tentu ini membuat kondisi keuangan yang lemah sehingga memerlukan bantuan.

Berkenaan akan dampak PKH dan BPNT itu sendiri tentu hal ini dapat dikaitkan dari adanya konsep kesejahteraan, seperti:

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual dan sekaligus sosial. Manusia akan merasa jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

⁹³Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: Kencana, 2007), h. 125-126

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valueable*) dibandingkan kehidupan dunia.⁹⁴

Bagaimana manusia mampu mencapai kesejahteraan sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Dengan sadar akan hakikat keberadaannya di dunia, mengapa tercipta di dunia. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta.

Setelah keterkaitan antara temuan penelitian dengan pembahasan teori pada Bab II, selanjutnya tentang keterkaitan hasil temuan penelitian ini dengan hasil temuan penelitian terdahulu. Didapatkan hasil bahwa masih tidak efektif untuk bantuan baik itu PKH maupun BPNT dalam pengentasan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Dalam temuan penelitian ini juga masih tidak efektif bantuan PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan program bantuan PKH dan BPNT masih ditemukan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan untuk masyarakat miskin. Karena hasil penelitian yang didapatkan antara realisasi penerima PKH dan BPNT dengan target penerima PKH dan BPNT adalah masih banyaknya masyarakat miskin atau target penerima PKH dan BPNT daripada masyarakat miskin yang sudah menerima atau realisasi penerima PKH dan BPNT.

⁹⁴Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 29-30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PKH merupakan program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin dengan diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai (*cash transfer*). Tujuan PKH untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, mengurangi angka kemiskinan dan dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan.
2. BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dan hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong. Tujuan BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan kebutuhan pangan agar meningkatkan gizi yang seimbang.
3. Efektivitas PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong berjalan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program bantuan PKH dan BPNT masih ditemukan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan untuk masyarakat miskin. Karena hasil penelitian yang didapatkan antara realisasi penerima PKH dan BPNT dengan target penerima PKH dan BPNT adalah masih banyaknya masyarakat miskin atau target penerima PKH dan BPNT daripada masyarakat miskin yang sudah menerima atau realisasi penerima PKH dan BPNT.

4. PKH dan BPNT dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dilihat berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu seperti keadilan, tanggung jawab, dan juga jaminan sosial. Implementasi dari ketiga tersebut didapatkan hasil bahwa dalam mengentaskan kemiskinan dilihat berdasarkan analisis dan kondisi diatas program bantuan PKH dan BPNT yang ada di Desa Selotong kurang dalam berlaku adil karena masih ditemukan tidak tepat sasaran dalam menentukan masyarakat miskin penerima manfaat dan kurangnya tanggung jawab yang dilakukan secara penuh, PKH dan BPNT hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima manfaat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses program bantuan PKH dan BPNT diharapkan ada evaluasi lagi, bagaimana cara dalam melakukan sosialisasi yang jauh lebih baik lagi dari pemerintah hingga sampai ke masyarakat. Memberikan pemahaman dan kesadaran untuk seluruh yang terlibat di dalam bantuan sosial yang diberikan pemerintah, baik aparat, tim pelaksanan maupun masyarakat. Dengan melihat aspek bantuan ini harus sampai tepat sasaran, yang terarah sesuai peraturan dari pemerintah tentang bantuan sosial. Dan juga untuk penentuan keluarga penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid dan selalu terupdate dari setiap lokasi masyarakat penerima, sehingga tepat sasaran dapat terlaksana dengan baik.
2. Untuk para tim pelaksana pemberian bantuan PKH dan BPNT diharapkan untuk lebih fokus lagi memberikan kesadaran kepada para keluarga penerima manfaat agar kedepannya tidak lagi bergantung hanya dari bantuan sosial yang diberikan pemerintah, melainkan bisa bangkit untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri agar semakin berkurangnya

para penerima bantuan ini menggambarkan bahwa keberhasilan akan efektif bantuan sosial ini untuk mengentaskan kemiskinan.

3. Untuk para penelitian selanjutnya, diharapkan bisa meneliti tentang efektivitas apa saja dalam program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga didapatkan hasil program mana saja yang efektif memberikan pengaruh dan implementasi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ali Lukman et.all., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Antoro Hajar Hari. *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2015.
- Aprianto Naerul Edwin Kiky, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, 2017.
- Arif Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- BPS Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam 2020*.
- BPS - *Survey Sosial Ekonomi Nasional 2015-2018*, <https://www.bps.go.id/>, (update 4 Oktober 2019)
- Badrudin Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Bi Rahmani Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Beik Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Budiman Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin Burhan (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Cicilia Vera Sri Endah, Sri Murni, Daisy M. Engka, *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

- Damayanti Elfana, Eva Nurazizah, Merin Dwi Rahayu, *Modul Statistika Induktif Uji Dependent Sample T Test, Independent Sample T Test, dan Uji Wilcoxon*, 25 Juni 2019.
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Ekardo Apando, Firdaus dan Nilda Elfemi, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 2014.
- Farida Ulfa Jamilatul, *Memahami Konsep Al-falah Melalui Penguatan Ketahanan Pangan Dalam World Islamic Economic Forum (WIEF)*, Journal of Islamic Economic Lariba, 2015.
- Harahap Isnaini. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Harahap Isnaini, M. Ridwan, *Islamic Economis*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Hakim Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- H. Simamora Ns Roymond. *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008.
- Ilmi Syaiful. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, 2017.
- Indri, Titik Triwulan Tutik. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Irawan Bambang, Isnaini Harahap, dan Marliyah. *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Jasmina Dewi. Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Hak dan Kewajiban Peserta PKH*, tersedia di: <http://www.yandatin.kemosos.go.id>, diakses pada Jumat, 22 November 2019.
- Kantor Desa Selotong, *Daftar Isian Profil Desa*.

- Kantor Desa Selotong, *Jumlah Penerima PKH dan BPNT Tahun 2015-2018*.
- Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung, *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*.
- Kuncoro Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN, 2002.
- M.s Kaelan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Noor Juliansyah. *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pedoman Umum, *Bantuan Pangan Non Tunai 2019*.
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Qorib, Ahmad. Isnaini Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, *Journal Analytica Islamica*, 2016.
- Rachman Benny, Adang Agustian, Wahyudi. *Efektifitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, Analisis Kebijakan Pertanian, 2018.
- Ramadhan Tondhi, Syamsul Bahri. *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2018.
- Riyadi Slamet. *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*, Lampung: Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016.
- Simamora, Ns Roymond H. M.Kep, *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008.

- Subagyo Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sengaji Elta Mamang, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sutrisno Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Makassar: Kencana, 2007.
- Suryawati, Chriswardani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 2005.
- Suleman Syahputra Adisanjaya dan Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 4, No. 1.
- Tarigan Azhari Akmal. *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: TNP2K, 2012.
- TNP2K, *Program Keluarga Harapan*, tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id> (diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019)
- TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019*.
- TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*.
- TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di: <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/> diakses pada Selasa, 22 Oktober 2019.
- Umar Husein. *Business An Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Umar Husen. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

Widianto Bambang. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: 21 November 2012.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, Cetakan keenam, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-020/EB/PP.009/01/2020

6 Januari 2020

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : *Penunjukan Pembimbing Skripsi*

Yth,

1. **Dr. Isnaini Harahap, MA**
2. **Muhammad Syahbudi, MA**

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Abdul Kurniawan**
NIM : **0501162163**
Jurusan : **Ekonomi Islam**

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

"Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat)"

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara.

1. **Dr. Isnaini Harahap, MA** untuk menjadi Pembimbing I, dengan cakupan tugas utama meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teoritis, Pembahasan dan Hasil Penelitian, Daftar Isi, Daftar Kepustakaan.
2. **Muhammad Syahbudi, MA** untuk menjadi Pembimbing II, dengan cakupan tugas utama meliputi Sampul Depan Skripsi, Halaman Dalam Skripsi, Lembar Pengesahan, Abstraksi, Kata Pengantar, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Penggunaan Bahasa yang efektif, Teknik Penulisan, dan Tanda Baca.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan



**PEMERINTAH DESA SELOTONG
KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

Jl. Besar Dusun II Selotong No. 261

Telp.

Kode Pos. 20855

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470-205/SL/III/2020

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUMARIONO, SH**
Jabatan : **KEPALA DESA SELOTONG**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa dibawah ini:

Nama : **ABDUL KURNIAWAN**
NIM : **0501162163**
Tempat/Tanggal Lahir: **Balimbingan, 05 April 1997**
Universitas : **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**
Sem/ Jurusan : **VIII / Ekonomi Islam**

- II. Benar telah melakukan Penelitian di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada Tanggal 11 Maret 2020 guna melengkapi data pada Penyusunan Skripsi yang berjudul: “**Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**”.
- III. Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selotong, 11 Maret 2020

KEPALA DESA SELOTONG


SUMARIONO, SH

Transkrip Wawancara

Informan I

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Poninten

Identitas Informan I

Nama : Sulasmi

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya menerima ya sudah 2 tahun ya..., ya senang karena terbantu untuk sekolah tadi, kan untuk sekolah kan.

6. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya alhamdulillah senang lah.

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya pokoknya kalau pas bayaran apalah eceknnya... teratasi itukan, duit itu tidak sempat untuk yang lain. Untuk sekolah ajalah memang asal pas keluar untuk bayar sekolah.

8. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Mula-mula mau dapat bantuan ya sebelumnya dikumpulkan di balai desa. Disitu terdata untuk nerima bantuan ini kan ya, terus melengkapi syarat ya KTP sama KK.

9. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Kayaknya ya gitu aja sih ya. Namanya bantuan ini untuk masyarakat miskin jadi ada tambahan ekonomi sehari-hari ya bisa buat kebutuhan anak sekolah ya kalo berasnya bisa buat makan gitu.

10. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya dapatnya itu Rp600.000.

11. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Harus diwajibkan kumpul kalo ada pertemuan, hah kalo nggak ikut kumpul apalagi sampe 3 kali nggak ikut ya bakalan di bokir.

12. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Ini keluarnya 3 bulan sekali terus kalo keluar ngambilnya melalui ATM

13. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Harapan ya kalo bisa masih dapat kan ya, jadi bisa terus bantu buat cukupin kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Transkrip Wawancara

Informan II

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Poninten

Identitas Informan II

Nama : Nur Ningsih

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Sudah 2 tahun nak. Hah, itu ya bantuan untuk nambah apa namanya untuk kebutuhan sekolah gitu. Nah ada juga yang bantuan beras alhamdulillah buat di makan.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya alhamdulillah senang bisa dapat bantuan.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya bantuan ini bisa membantu masyarakat miskin jadi ada masukan lebih buat nambah-nambah sehari-hari.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Untuk dapat ini ya bantuan itu pas ada di kumpulkan di balai desa kan jadi pake data KTP terus KK nak.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Untuk yang ini gimana ya bilanginya nak, inikan bantuan untuk masyarakat miskin kan ya. Hah, jadi yang nerima ini seperti bergantung gitu buat tambahan kebutuhan.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya dapat bantuannya ya sekitar Rp600.000 gitu nak.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Ada sanksi kalau ibu tidak datang selama 3 bulan, enggak datang bisa ditarik kembali. Kami setiap bulan kumpulan, hah.. sanksi lain dilihat dimana para penerima PKH kok masih ada gizi buruk, itu disanksikan juga. Karena pemerintah kan ngasih telur, hah.. supaya anggota PKH gizinya balitanya atau bayinya harus sehat.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Itu nak kita ngambilnya dari ATM. Jadi pada ngambil dari BRI link dan kalo yang berasnya dari warung sekalian sembakonya gitu.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Ya pokoknya bantuannya tetap dapat. Karena kalo cuma penghasilan suami kurang. Jadi biar ada biaya tambahan untuk anak sekolah.

Transkrip Wawancara

Informan III

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Poninten

Identitas Informan III

Nama : Poninten

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Ada berjalan sudah 2 tahun dapatnya. Hah, ini bantuannya ya untuk anak sekolah terus bantuan satunya tambahan sembako gitu ada beras.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Perasaannya ya syukur alhamdulillah senang lah, ada bantuan di dapat.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya gini kan ya ada bantuan untuk masyarakat jadi bisa bantu-bantu untuk kebutuhan.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Seperinya udah ya nak, karna Cuma pake KTP sama KK terus ada raport anak sekolah gitu.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Ya udah ya, ya kita cemani ini masyarakat ya mensyukuri aja kan, berapa dapatnya berapa apanya ya syukurin aja, itu ajalah. Ya arahnya untuk itu tadi membantu masyarakat miskin apalagi bantuan untuk biaya anak sekolah kan ya.. disini ya dari tahap 1 sampe tahap 2 masih sama sih gitu aja yang di kasih. Masih campur yang benar-benar layak sama yang mampu masih dapat

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya dapatnya Rp775.000 ribu nak.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Hah, itu bisa dikeluarkan dari nerima bantuan nak. Itu apa namanya hah, ada kumpulan tapi nggak datang.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Itu langsung dari Bank BRI nak. Hah, kalo pas keluar bantuannya ya itu tadi ngambilnya dari ATM. Terus yang bantuan beras itu orang ibu ngambil dari warung yg jadi tempat ngambil bantuannya, gitu nak.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Kalo untuk harapan ya namanya juga manusia nak, apalagi kalo udah dapat bantuan kan ya pingin dapat lagi terus lanjut gitu nak. hehe

Transkrip Wawancara

Informan IV

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan IV

Nama : Doniyem

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

2 tahun ini nak ibu udah dapat bantuan ini. Itu untuk bantuan ini ya digunakan tambahan ekonomi rumah tangga nak, ya ada anak masih sekolah kan jadi bisa untuk keperluan anak.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Tentu senang sekali nak, namanya bantuan kan ya siapa yang bakal nolak.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Asal pas keluar disitu untuk bayar sekolah. Ya jadinya terbantulah nak.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Itu nak pernah saat dikumpulkan di balai desa pake KTP sama KK gitu syaratnya.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Kalau cerita kurangnya manusia ini gak ada cukupnya, hah.. pasti kurang aja dikasih berapa pun, tapi ya alhamdulillah ada bantuan kita syukurin aja apa adanya, kalau misalnya ada ditambahi ya alhamdulillah, ya cemana... namanya kita apa dari atasan yaitu pemerintah kalau dapatnya berapa dikasih pemerintah terima. Itu apapun ceritanya.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya dapatnya Rp1.000.000 nak. Ya alhamdulillah. Dapatnya memang kadang gak nentu. Ini ya mungkin bisa banyak karna tiap tahun ada tambahan untuk orang tuanya nak. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Kami di kasih sanksi ya itu nak bisa di blokir nerima bantuan kalo nggak ikut pertemuan yang diadakan.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Ngambilnya pake ATM gitu nak. Di Dusun sini ada BRI link jadi ngambil situ. Terus yg satunya ngambil beras dan sembako dari warung yg ada di Dusun VII.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Semoga tetap terus berlanjut nggak stop di tengah jalan nerima bantuan ini.

Alhamdulillah tetap senang.

Transkrip Wawancara

Informan V

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan V

Nama : Nuraini

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Hah... ibu inikan yang ditahap pertama, jadi sudah sekitar 4 tahun mendapat bantuan. PKH itu bantuan yang orang miskin lah, ekonomi miskin.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya perasaan ibu ya senang, hah.. kan membantu yakan untuk sekolah.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya pokoknya kalo pas ada bayar sekolah bisa terbantu, karena biasa keluar disitu butuh untuk sekolah disitu bantuannya keluar.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Sudah dek, ya dengan syarat pake KTP, KK dan raport anak sekolah.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Ya gimana ya dek, namanya bantuan yakan dari pemerintah gitu. Ya kita masyarakat ya mensyukuri aja kan, berapa dapatnya berapa apanya ya syukurin aja, itu ajalah. Masih terdaftar nerima ya di syukurin.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Dapatnya gak nentu dek, ya kemarin dapatnya sekitar Rp775.000 gitu.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Kalo sanksi sudah pasti ada dek, jadi kita ya mau nggak mau wajib nurut ajalah. Itu apa namanya jangan sampe nggak ikutan kumpulan para penerima bantuan yang diadakan biasanya tiap tanggal 5 gitu.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Ngambilnya itu hah, dari gesekan gitu dek. Kita pake ATM kan terus dari BRI link ngambil uangnya. Ada di warung warga untuk ngambil yg berasnya.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Karna saya mungkin termasuk sudah lama dapat kan ya. Alhamdulillah jadi terbantu gitu sih buat nambah-nambah. Nah jadi ya kalo bisa tetap berjalan terus, jadi yang belum dapat butuh bantuan juga segera dapat.

Transkrip Wawancara

Informan VI

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan VI

Nama : Santi Handayani

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Sudah berjalan 2 tahun ini bang. Hah, itu namanya bantuan sangat membantu sih buat yang nerima.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Senang ya bang, ya alhamdulillah gitu jadi ada penambahan keuangan.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya itu tadi bang, jadi ada tambahan keuangan karna dapat bantuan itu kan lumayan. Hmm bisa membantu untuk ekonomi sehari-sehari sih intinya.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Untuk prosedur menerima bantuan ini ya syaratnya inikan dari atasan dari pemerintah bantuannya, dan tiba-tiba waktu itu memang dikumpulkan di balai desa. Syaratnya itulah KTP sama Kartu Keluarga (KK) dan juga rapor anak sekolah. Kalau masih ada anak sekolah kalau tidak ada lagi yang sekolah ya diputuskan bantuan itu. Ini bantuan sampai SMA aja dapat dimulai dari anak masih SD.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Untuk hal ini kayaknya tuh belum ya bang. Ya karna pasti ada yang nambah anggota baru nerima bantuan ini.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya dapatnya itu di Rp600.000 bang.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Oh kalo yang ini itu ada yang namanya bakal di blokir gitu sih kalo nggak ikut perkumpulan gitu.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Rp600.000 selama 3 bulan sekali. Beda-bedalah karena kan nengok anaknya. Rezeki dalam itu gak tau kan ada yang dapatnya sekian, sekian gak sama, anak 1 sikit anak 2 ya berapa.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Harapan ya kalo bisa dapat lagi. Anak juga kan masih sekolah ya memang sampe batas SMA sih bantuannya dapat. Mana tau bisa lanjut dari situ ya lumayan. Hehe.

Transkrip Wawancara

Informan VII

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan VII

Nama : Salmiah

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya sudah 2 tahun dapat bantuan kayak gini dek. Hmm itu kalo bantuan ini mah sangat bantu kali ya buat kami-kami ini dek yang cuma ibu rumah tangga.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Yang pasti bersyukur dek. Alhamdulillah senang jadi terbantu untuk ekonomi.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Pendapat ibu ini ya dek, hah, ya kayak bayaran anak sekolah bantuan itu untuk bayar ujian dek, keperluan anak sekolah ya sama bantuan beras buat makan kan ya, gitulah dek. Jadi pokoknya kami terbantu dek.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Hah apa itu dek pas ada di kumpul balai desa kan ya nah jadi disuruh lengkapi ya pake KTP sama KK gitu dek.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Ya kayak ibu ini dek ada bantuan kan terbantu yakan. Hah, jadi pokoknya sama masyarakat kurang mampu jadi terbantu lah dek, gitu.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Dapatnya Rp775.000 dek. Nah pas ada pembayaran sekolah anak jadi uangnya bisa di pake ke anak dek.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Hah, kalo sanksi kayak ya bisa di blokir gitu dek. Itu kalo nggak ikut kumpulan gitu dek.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Dari gesekan kita itu ATM dari BRI langsung dari bank melalui BRI link. Kami BRI link aja nanti dikasih tau, eh PKH keluar, kami gesek ada itu yang ngasih tau, yang ngasih tau pengurusnya nanti di telponkan ada kelompok, ketua kelompoknya ada. Setiap kelompoknya didatengi kasih arahan, nanti kalau datang bantuan itu nantikan kamikan udah punya ATM nanti kedengaran itu, ini beras keluar. Dari Dusun 7 warung Surya sama Secanggang ngambil berasnya.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Harapan ya kalo bisa dapat lagi, terus ya iyakan masih ada yang sekolah. Ya kalo bisa dapat terus lah biar tetap terbantu.

Transkrip Wawancara

Informan VIII

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan VIII

Nama : Darwati

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Ibu 2 tahun nak dapat ginian. Ya gambaran cemani ini ya, hmm inikan dari atasan kan nak, apa itu dari pemerintah jadi untuk bantuan masyarakat miskin gitu.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya alhamdulillah pastinya senang lah nak. Namanya juga kan dapat bantuan.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya pokoknya jadi terbantu yakan, kalo pas bayar ter apalah eceknnya.. teratasi gitukan, duit itu gak sempat untuk yang lain, untuk sekolah ajalah memang. Asal pas keluar untuk bayar sekolah.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Prosedurnya ya kayak itu dikumpulkan KTP sama KK gitu nak.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Ya udah ya.. ya kita cemani ini masyarakat ya mensyukuri aja kan, berapa dapatnya berapa apanya ya syukurin aja, itu ajalah.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Untuk besaran bantuan inikan 3 bulan sekali dapat dari bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Hah... jadi bulan 4 inikan nanti bulan 7 dapat alhamdulillah, masuk anak sekolah jadi bisa beli seragam sekolah dan kebutuhan lainnya. Kami nggak tentu dapatnya SMA Rp 500.000, SMP Rp 275.000. Ini di awal tahun biasa dapatnya yang banyak karna untuk orang tua juga dapat, jadi gak tentu karena tanggalnya ngaret biasa di awal bulan kadang double kalau pas bulan sebelumnya belum masuk.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Ada nak. Ya inikan kami diwajibkan datang kalo ada kumpulan gitu nak. Bisa 3 kali nggak datang itu apa namanya bisa di blokir dari nerima bantuan gitu.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Kami kalo pas bantuannya udah cair ngambilnya pake ATM gitu nak. Nah dari BRI link lah kami ngambilnya. Kalo yang satu lagi itu beda ngambilnya kami di warung gitu yang khusus ngambil bantuan yang satu lagi itu.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Untuk harapan kedepan kalau kami bilang ya tergantung atasan yaitu pemerintah kalau bisa ya berlanjut kalau masih ada anak yang sekolah, kayak

Ibu yakan masih muda suami Ibu kerjanya mocok-mocok kadang kerja kadang nggak, jadi sangat membutuhkan dengan adanya bantuan yang diberikan.

Transkrip Wawancara

Informan IX

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan IX

Nama : Siti Masitah

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Hah... hampir 2 tahun lah, karena kami usulan pun di tahap yang kedua.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Kalau saya ya syukur alhamdulillah lah, bantuan ini kan pertama untuk anak sekolah. Ya masalah beras kan perekonomian menambah ekonomi sehari-hari.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya kalau saya pas mungkin ya... ada yang enggak. Hah.. gitu ada yang pas, ada yang punya sawah ada yang mampu ada yang punya kereta itu dapat, Cuma saya terus terang karena gak ada rumah pun numpang hah.. itu pas kalau untuk saya tapi kalau yang lain ntah.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Syaratnya kita nggak tau ya dari atasan. Tiba-tiba, eh memang waktu itu dikumpulkan di balai desa. Hah, syaratnya itulah pertama KTP, KK, sama raport anak sekolah. Ya tiap masih ada anak sekolah dapat kalo nggak ada lagi ya diputuskan. Di blokir sampe SMA aja.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Kalo cerita kurangnya manusia ini nggak ada cukupnya, pasti kurang aja di kasih berapa pun. Ya tapi alhamdulillah ada bantuan kita syukurin apa adanya. Hah, kalo misalnya di tambah ya alhamdulillah. Cemana namanya kita dari atasan dari pemerintah. Itunya dapat berapa yang di kasih pemerintah langsung terima. Apapun ceritanya yakan.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya dapatnya Rp600.000 untuk 2 anak sekolah yang masih SD.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Ada. Sanksinya kalo ibu nggak datang selama 3 kumpulan nggak datang terus bisa ditarik balik, hah itu di blokir.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Penyalurannya dari ini atasan. Dari apa kita, gesekan apa itu ATM. Dari BRI link, langsung dari Bank melalui BRI link. Hah, kami BRI link aja.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Harapannya ya kalo bisa masih bisa lanjut lagi dapat, karena kan masih ada sekolah. Dapatnya sampe anak selesai SMA.

Transkrip Wawancara

Informan X

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Rumah Ibu Doniyem

Identitas Informan X

Nama : Ernawati

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Penerima PKH dan BPNT

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran PKH dan BPNT?

Jawab:

Saya sudah 2 tahun dapat. Hah, maksudnya untuk gambarannya ya membantu lah untuk anak sekolah kan.

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Alhamdulillah senang sekali. Karena namanya bantuan juga untuk membantu, apalagi ya itu tadi untuk anak sekolah digunakan. Ya bantuan satu lagi itu berasnya ya untuk makan.

3. Bagaimana pendapat Bapak /Ibu terhadap program bantuan PKH dan BPNT?

Jawab:

Ya bantuan ini bisa digunakan nambah ekonomi sehari-hari itu. Hah, jadi kayak apa itu pas ada biaya sekolah kayak ujian gitu kan tiba ada bantuan keluar bisa untuk digunakan untuk itu.

4. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?

Jawab:

Untuk bisa dapat bantuan ini ya awalnya sudah di data terus dikumpulkan di balai desa. Setelah itu ya syaratnya kayak KTP, KK gitu yang di pakai.

5. Apakah hasil yang telah dicapai program ini, sudah mampu menjawab permasalahan kemiskinan di Desa Selotong?

Jawab:

Kalo untuk kemiskinan ini ya namanya bantuan ini untuk masyarakat miskin. Jadi bantuannya bisa digunakan membantu perekonomian di rumah tangga. Hah, itulah masih pada dapat bantuan sampe anaknya tamat SMA.

6. Berapa besaran bantuan yang diterima dari PKH dan BPNT?

Jawab:

Anak saya satu SMP dan satunya sudah SMA dapatnya Rp775.000.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan bila melanggar komitmen?

Jawab:

Sanksinya ya kita ini ada namanya itu kumpulan. Nah, dari kumpulan ini yang nggak datang sampe 3 kali pertemuan ya bantuannya di blokir.

8. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Jawab:

Ya dapatnya itu ngambil pake ATM. Hah, jadi di gesek ngambil di BRI link. Terus untuk bantuan berasnya ngambil dari warung di dusun VII.

9. Apa harapan Bapak/Ibu tentang PKH dan BPNT kedepannya?

Jawab:

Harapan ya kalo bisa dapat lagi, terus iyakan masih ada yang sekolah. Masih sekolah pengen sekolah lagi kok terus. Ya kalo bisa dapat terus lah.

Transkrip Wawancara

Informan XI

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Kantor Desa Selotong

Identitas Informan XI

Nama : Fitriani

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : KASI pemerintahan Desa Selotong

Hasil Wawancara

1. Berapa jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong?

Jawab:

Untuk sampai saat ini dari tahun 2019-2020 penerima PKH dan BPNT berjumlah 372 KK. Untuk gambaran bantuan ini ya membantu sebenarnya, tapi ada juga ya kecemburuan, membantu keuangan kepala keluarga terutama untuk ibu rumah tangga, mengurangi hah... pembelanjaan, ada tambahan membantu keuangan kepala keluarga, Intinya itu.

2. Bagaimana gambaran PKH dan BPNT di Desa Selotong?

Jawab:

Untuk gambaran bantuan ini ya membantu sebenarnya, tapi ada juga ya kecemburuan, membantu keuangan kepala keluarga terutama untuk ibu rumah tangga, mengurangi hah... pembelanjaan, ada tambahan membantu keuangan kepala keluarga, Intinya itu.

3. Apa partisipasi yang dilakukan masyarakat yang menerima bantuan PKH dan BPNT untuk Desa Selotong ini?

Jawab:

Untuk partisipasinya ya itu perkumpulan setiap bulannya, kan partisipasinya timbal balik setelah dari mendapat bantuan itu tadi.

4. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan PKH dan BPNT di Desa Selotong?

Jawab:

Dan untuk pencapaian ya bagus, tapi... kalau misalnya dilihat dari jumlah penduduk Selotong yang kurang mampu sih belum efektif. Tapi tak lepas dari itu pemerintah Desa Selotong tetap berusaha mencari informasi mana masyarakat yang belum terdaftar di penerima PKH dan BPNT. Jadi pemerintah desa itu tidak lepas tangan. Dengan dari Dinsos ada kuota nih tiap tahunnya berapa orang penerimaan, ya tindakan pemerintah desa nggak hanya mengharapkan dari Dinsos. Sementara Dinsos memberikan hanya sekian orang penambahan pemerintah desa tidak langsung iya segitu aja, nggak gitu tapi mencoba melakukan penambahan yang lain.

5. Bagaimana respon masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT? Adakah kecemburuan sosial?

Jawab:

Ya bicara adanya cemburu itu udah pasti ya dek, apalagi ini berkenaan bantuan. Pasti semuanya pun pingin dapat. Ya karna adanya kecemburuan ini juga bisa berpengaruh akan keharmonisan bertetangga itu tadi.

6. Apakah dengan adanya bantuan ini merubah perilaku masyarakat?

Jawab:

Kalo di bilang merubah sepertinya nggak ya. Ya karna anggapan masyarakat kalo di kasih bantuan senang sekali, ya bersyukur juga. Tapi ya disini nggak berpikir untuk bagaimana supaya bisa lepas dari bantuan kan ya, karna bantuan ini kan mengatasnamakan masyarakat miskin tadi.

7. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?

Jawab:

Ya kendala itu dari bagaimana bisa merubah pola pikir masyarakat itu tadi, jangan berharap hanya menerima aja. Tapi bagaimana agar bisa mandiri dalam keluarga.

8. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa?

Jawab:

Ya tentu mungkin bisa diadakan dengan sosialisasi, dengan diadakan pelatihan dek. Ya supaya ada peningkatan kualitas SDM di Desa Selotong ini.

Transkrip Wawancara

Informan XII

Tanggal Wawancara : 11 Maret 2020

Tempat/Waktu : Kantor Desa Selotong

Identitas Informan XII

Nama : Fatimah

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Sekretaris Desa Selotong

Hasil Wawancara

1. Berapa jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Selotong?

Jawab:

Jumlah penerima PKH dan BPNT saat ini terdata di kantor desa itu berjumlah 372 KK dek.

2. Bagaimana gambaran PKH dan BPNT di Desa Selotong?

Jawab:

Ya melihat gambaran yang ada di Desa ini bantuan itu dirasakan sangat membantu untuk masyarakat penerima. Apalagi kan karna tergolong kurang mampu itu ya dek. Jadi terbantu dari segi ekonominya.

3. Apa partisipasi yang dilakukan masyarakat yang menerima bantuan PKH dan BPNT untuk Desa Selotong ini?

Jawab:

Partisipasinya ya saat melakukan pendataan untuk penerima bantuan ini sebelumnya melengkapi dengan KTP, KK kemudian sama raport anak. Setelah menjadi penerima ya adanya perkumpulan setiap bulannya yang dilakukan, biasanya itu di tanggal 5 dek.

4. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan PKH dan BPNT di Desa Selotong?

Jawab:

Dilihat dari seluruh kondisi masyarakat di desa ini ya bantuan itu masih dikatakan tidak efektif sih dek. Mengapa? Karna ya dengan jumlah masyarakat miskin ataupun kurang mampu ini masih lebih banyak dibanding dari yang menerima bantuan itu. Ya kami juga dari pihak desa berusaha mencari informasi mana masyarakat yang belum terdaftar di penerima PKH dan BPNT. Jadi kami juga nggak bisa lepas tangan gitu aja untuk membantu.

5. Bagaimana respon masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT? Adakah kecemburuan sosial?

Jawab:

Pasti ada kecemburuan sosial, karena masyarakat Desa Selotong yang benar-benar layak menerima bantuan tapi belum terdaftar sebagai penerima. Karena bantuan ini ya... belum efektif, karena masih banyak yang belum menerima bantuan. Karena bantuan ini nggak bisa sekaligus semua ada tahapannya. Kalau kami dari Desa pinginnya agar semua dimasukkan tapi dari pemerintah standar kuotanya jadi harus dibatasi.

6. Apakah dengan adanya bantuan ini merubah perilaku masyarakat?

Jawab:

Sebenarnya kalau dilihat merubah perilaku masyarakatnya ya nggak sih. Mereka nggak merubah perilaku kehidupan. Maksudnya merubah dalam arti kayak gini, hmm.. kan berarti kalau orang penerima bantuan kan diatasnamakan tidak mampu, nah mereka malah berpikir bantuan itu memang cocok untuk orang itu, ya jadi orang itu nggak akan merubah. Intinya nggak merubah sih.

7. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?

Jawab:

Karena di desa ini masih banyak tergolong prasejahtera, lowongan pekerjaan itu yang nggak ada. Karena di desa cuma mengharapkan dari hasil laut sama

hasil tani. Intinya dari kendala itu bisa mengubah SDM itu, dan kali ini belum ada cara kita yang efektif merubah pola pikir SDM, kayak gitu sih.

8. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa?

Jawab:

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat caranya banyaknya mengundang narasumber untuk membentuk suatu bimbingan, yaitu meningkatkan bimtek mengenai peningkatan SDM itu sendiri.

Gambar Dokumentasi



Proses Wawancara



Proses Wawancara



Proses Wawancara



Penerima PKH dan BPNT :
Ibu Nur Ningsih, Ibu Poninten, dan Ibu Sulasmi



Penerima PKH dan BPNT :

Ibu Salmiah, Ibu Ernawati, Ibu Siti Masitah, Ibu Santi Handayani, Ibu Darwati, Ibu Doniyem, dan ibu Nur Aini